

**STRATEGI KANDIDAT PADA PILKADA  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN POHUWATO**

***CANDIDATES STRATEGIES IN THE 2020 REGIONAL  
ELECTIONS IN POHUWATO DISTRICT***

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**BALA  
E052201006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGAJUAN**

**STRATEGI KANDIDAT PADA PILKADA  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN POHUWATO**

Tesis diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister  
Padfa Program Studi Magister Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh

**BALA  
E052201006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### STRATEGI KANDIDAT PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN POHUWATO

Disusun dan diajukan oleh

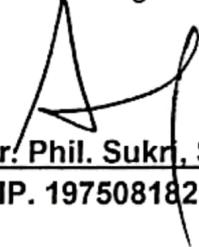
**BALA**

E052201006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **15 Agustus 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



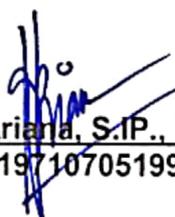
Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si  
NIP. 197508182008011008

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si  
NIP. 19710705199803 2002

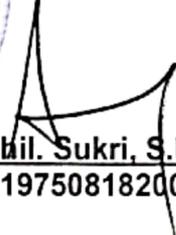
Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.  
NIP. 19710705199803 2002



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si  
NIP. 197508182008011008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bala  
Nomor Pokok Mahasiswa : E052201006  
Program Studi : Magister Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang Menyatakan



Bala

## ABSTRAK

**BALA. Strategi Politik Kandidat pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato** (dibimbing oleh Sukri dan Arlana).

Penelitian ini bertujuan memahami strategi politik dan strategi pemanfaatan modalitas pasangan kandidat Saipul Mbuinga-Suharsi Igirisa sebagai upaya memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato. Teori yang digunakan adalah strategi politik yang digagas oleh Schroder dan teori modalitas versi Pierre Bourdieu. Jenis penelitian kualitatif digunakan mendeskripsikan realitas strategi politik dan pemanfaatan modal yang dilakukan oleh kandidat Saipul Mbuinga-Suharsi Igirisa dalam upaya memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Kami menemukan, strategi politik yang dilakukan antara lain: pembentukan popularitas, kandidasi, pembentukan koalisi mayoritas, dan kampanye politik. Adapun, strategi pemanfaatan modalitas dilakukan dengan memaksimalkan modal sosial dan modal politik yang dimiliki. Dari keseluruhan strategi politik yang dilakukan tersebut, pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara sebesar 41,11% pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: strategi politik, kandidat, modalitas, dan pilkada



## ABSTRACT

**BALA. Candidates' Political Strategies in the 2020 Regional Election in Pohuwato District** (supervised by Sukri and Ariana)

This study aims to understand the political strategy and the strategy of utilizing the modality of the Saipul Mbuinga-Suharsi Igrisa candidate as an effort to win the 2020 regional head election (Pilkada) in Pohuwato Regency. The theory used is the theory of political strategy initiated by Schroder and Pierre Bourideu's version of modality theory. The research method used is a qualitative method to describe the reality of political strategy and capital utilization implemented by Saipul Mbuinga-Suharsi Igrisa candidate in an effort to win the 2020 regional head election in Pohuwato Regency. The data collection method used was in-depth interview and documentation study. The results show that the political strategies performed are the strategy of forming popularity, strategy of candidacy, strategy of forming a majority coalition, and strategy of political campaigning. Meanwhile, the modality utilization strategy is carried out by maximizing social capital and political capital owned. From the overall political strategies implemented, the pair won the contestation with 41.11% of the votes in the 2020 regional elections in Pohuwato Regency.

Keywords: political strategy, candidates, modalities, election



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala nikmat yang dicurahkan secara terus menerus tanpa henti. Dengan nikmatNya jualah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini walaupun disana sini masih diwarnai kekurangan-kekurangan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dengan segala keteladannya telah mengajarkan ummatnya kemampuan dan kreativitas untuk “membaca” segala fenomena dan tanda-tanda alam yang telah diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini.

Penelitian ini berjudul “Strategi Kandidat Pada Pilkada tahun 2020 Di Kabupaten Pohuwato”. Pemilihan tema ini berangkat dari ketertarikan penulis untuk memahami lebih jauh fenomena politik terhadap figur pasangan kandidat yang berhasil membangun koalisi besar dukungan partai politik serta berhasil memenangkan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, figur tersebut memiliki modal ekonomi yang dianggap terbatas. Fenomena ini dianggap relatif keluar dari “kebiasaan” yang selama ini jamak terjadi disetiap perhelatan demokrasi. Umumnya calon yang memenangkan pertarungan dalam panggung politik pemilu maupun pilkada adalah yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat memadai.

Penelitian ini diakui bukanlah gagasan tunggal dari penulis. Begitu banyak pihak yang turut berkontribusi atas lahirnya karya ini. Oleh karena itu, penulis patut menaruh hormat dan berterima kasih kepada:

1. Dr. Phil. Sukri Tamma., S.IP.,M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Inovasi FISIP periode 2018-2022, dan Dekan FISIP periode 2022-2026,

sekaligus sebagai pembimbing utama dalam penelitian tesis ini. Di tengah kesibukan beliau untuk memastikan segala pelaksanaan kebijakan tri dharma perguruan tinggi berjalan dengan baik, beliau tetap berusaha menyempatkan diri untuk memberikan masukan-masukan kritis dalam tesis ini. Dari beliau saya belajar tentang cara menganalisis berbagai fenomena dengan pendekatan multi perspektif, lalu membingkai kembali "*reframing*" agar setiap isu-isu keilmuan yang dipandang "sebagian" orang tidak layak untuk ditulis, menjadi layak dan bernilai ilmiah. Dari interaksi selama proses perkuliahan, menjadikan penulis makin "percaya diri" untuk menulis tema ini.

2. Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si Ketua Program studi Magister Ilmu Politik, sekaligus pembimbing pendamping dalam tugas akhir ini, dari beliau saya belajar tentang cara berpikir yang kritis, dan menulis dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Di tengah kesibukan untuk memastikan segala aktivitas akademik berjalan dengan baik di Program Studi Magister Ilmu Politik, beliau tetap disiplin memberikan bimbingan kepada kami mahasiswanya. Bahkan di kalangan mahasiswa sangat akrab dengan kalimat "mohon ingatkan saya setiap dua hari", tak jarang beliau mengambil inisiatif mengingatkan langsung mahasiswa, apabila dinilai mahasiswa yang bersangkutan stagnan dalam progres penulisan tugas akhirnya.
3. Prof. Dr. Armin Arsyad., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2018-2022. Sebagai penguji dalam penelitian ini, beliau banyak memberikan masukan-masukan kritis yang amat berharga untuk penyempurnaan karya ini. Dari interaksi beliau selama perkuliahan menjadi

salah satu inspirasi lahirnya gagasan untuk mengangkat tema dalam penelitian ini.

4. Prof. Dr. Muhammad Al Hamid, S.IP.,M.Si. Ditengah kesibukan mengemban amanah dari negara, sebagai hakim dalam penegakkan moral, etika dan integritas bagi ribuan penyelenggara pemilu dan pilkada di negeri ini, beliau tetap menyisihkan waktu untuk memberikan masukan-masukan dalam karya ini. Beliau selalu berusaha istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pendidik untuk mahasiswanya. Bahkan komunikasi dari mahasiswa sangat direspon dengan cepat dan selalu berlangsung cair dalam setiap interaksi. Dari beliau saya belajar tentang arti integritas, adil dan konsistensi dalam setiap tindakan.
5. Prof. Dr. Juanda Nawawi., M.Si, Guru besar yang sangat bersemangat dalam mengembangkan keilmuan khususnya isu-isu mutakhir menyangkut politik dan pemerintahan. Disetiap aktivitas perkuliahan selalu memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswa agar tertantang untuk berpikir kritis menyikapi persoalan-persoalan politik yang terus terjadi dari waktu ke waktu.
6. Seluruh staf administrasi di FISIP yang telah memberikan pelayanan dengan penuh keramahan dan ketulusan. Terima kasih yang tak terhingga, karena dari ketulusan dan keramahan dalam melayani, sangat membantu dalam kelancaran penyelesaian studi ini.

Namun yang utama dan tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua penulis, walaupun tak pernah mengenyam pendidikan formal, tapi dari merekalah saya belajar tentang nilai-nilai proses, kearifan dan kesabaran. Andai setiap gelar

akademik dari perguruan tinggi yang diperoleh anak-anaknya dapat dialihkan, maka merekalah yang pantas menerima gelar akademik tersebut. Mereka adalah pahlawan yang tulus, dan jasanya sungguh tiada tara. Dan kepada mama yang dipanggil pulang kepadanya, saat proses studi masih berada di semester dua. Semoga mama bahagia di sisinya, maafkan anakmu mah, karena disaat mama pergi, anakda tak berada disampingmu, bahkan sampai jasadmu diantar ke tempat pembaringan terakhir, anakda tak sempat mengantarmu, karena sesuai wasiat mama saat masih sehat, bahwa kelak ketika mama dipanggil pulang, maka tak perlu menunggu anak-anakmu yang berada dirantau, karena bagimu anakmu yang diperantauan sedang berjihad mencari nafkah untuk keluarga. Bahagia di alam sana mah, Insya Allah kelak kita akan berkumpul di hari akhir bersama dalam Ridhonya.

Teristimewa buat istriku Dewi Umbarsari dan anak-anakku Mufiz dan Mukhlisa, kalian adalah “guru” yang telah memberi inspirasi pada banyak hal untuk “nutrisi” dalam memahami proses kehidupan ini menjadi lebih baik.

Dan kepada rekan-rekan seangkatan, terima kasih telah menjadi mitra diskusi yang sangat konstruktif, dari kalianlah saya belajar tentang arti “adaptasi” dalam setiap interaksi.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah segala sesuatu dikembalikan.

**Makassar, Agustus 2022**



**Penulis**

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                      | i              |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                 | ii             |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                     | iii            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                         | iv             |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                       | v              |
| <b>ABSTRAK</b> .....                            | vi             |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                 | 1              |
| A. Latar Belakang Masalah.....                  | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....                         | 16             |
| C. Tujuan Penelitian.....                       | 16             |
| D. Manfaat Penelitian.....                      | 17             |
| <b>BAB II.TINJAUAN PUSTAKA</b> .....            | 18             |
| A. Teori Tentang Strategi Politik .....         | 18             |
| B. Pembentukan Koalisi Partai.....              | 29             |
| C. Strategi Kampanye Politik.....               | 34             |
| D. Teori Tentang Modalitas.....                 | 38             |
| E. Konsep Pemilihan Kepala Daerah langsung..... | 53             |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....       | 54             |
| G. Kerangka Pikir Penelitian.....               | 59             |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....         | 65             |
| A. Pendekatan Penelitian.....                   | 65             |
| B. Fokus Penelitian.....                        | 66             |
| C. Lokasi Penelitian.....                       | 66             |

|  |            |
|--|------------|
| D. Penetapan Informan.....                           | 67         |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                      | 68         |
| F. Jenis dan Sumber Data.....                        | 70         |
| G. Teknik Analisis Data.....                         | 70         |
| <b>BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>   | <b>74</b>  |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Pohuwato .....            | 74         |
| B. Profil Pasangan Kandidat.....                     | 84         |
| C. Tujuan Sasaran, Visi, dan Misi Pasangan.....      | 91         |
| <b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>95</b>  |
| A. Strategi Pembentukan Popularitas.....             | 95         |
| B. Strategi Kandidasi.....                           | 104        |
| C. Strategi Pembentukan Koalisi Mayoritas.....       | 108        |
| D. Strategi Kampanye Politik.....                    | 121        |
| E. Strategi Maksimalisasi Pemanfaatan Modalitas..... | 135        |
| F. Implikasi Teori.....                              | 148        |
| <b>BAB VI.KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>             | <b>154</b> |
| A. Kesimpulan .....                                  | 154        |
| B. Saran-Saran.....                                  | 157        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                           | <b>160</b> |

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Tabel 1.1. Data Perolehan Kursi Anggota DPRD Pohuwato ..... | 5              |
| Tabel 1.2. Peta Dukungan Partai Politik.....                | 7              |
| Tabel 1.3. Daftar Calon Kepala Daerah Termisikin.....       | 9              |
| Tabel 1.4. Daftar Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah .....  | 10             |
| Tabel 1.5. Laporan Dana Kampanye .....                      | 13             |
| Tabel 1.6. Hasil Perolehan Suara Calon .....                | 15             |
| Tabel 2.1. Jenis Dan Cakupan Modal .....                    | 44             |
| Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.....  | 75             |
| Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Pohuwato .....                   | 76             |
| Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan PDRB .....                      | 77             |
| Tabel 4.4. Distribusi Persentase PDRB .....                 | 78             |
| Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan .....   | 80             |
| Tabel 4.6. Alokasi Kursi DPRD Pohuwato .....                | 81             |
| Tabel 5.1. Daftar Partai Politik Pendukung .....            | 114            |
| Tabel 5.2. Motivasi Koalisi Partai Politik Pendukung .....  | 116            |
| Tabel 5.4. Perbandingan Jumlah Harta Kekayaan Calon.....    | 145            |
| Tabel 5.5. Perolehan Suara Calon .....                      | 148            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan paradigma pemilihan umum kepala daerah dari sistem perwakilan melalui lembaga legislatif menjadi sistem pemilihan langsung, membawa harapan untuk perluasan partisipasi politik rakyat dalam menentukan figur pemimpin di daerah. Perubahan paradigma ini merupakan salah satu upaya perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat, serta memiliki legitimasi politik yang kuat. Sejatinya pergeseran sistem ini memberi ruang dan kebebasan partisipasi politik rakyat secara maksimal. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki peran strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi di tingkat lokal yang berkeadilan, pemerataan kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara kestabilan pemerintahan melalui sinergi yang baik antara pemerintah dengan rakyat, dan termasuk juga sinergi antara pemerintah pada semua level pemerintahan secara berjenjang.

Sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan di daerah, pelibatan rakyat secara langsung dalam menentukan pucuk pimpinan tertinggi sejatinya harus terus ditumbuhkan. Sekalipun demikian, hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek demokrasi tersebut, sering kali muncul banyak distorsi, sehingga oleh sebagian kalangan menganggap pilkada langsung belum sepenuhnya efektif melahirkan figur pemimpin di daerah yang berkualitas. Namun demikian, bagi kontestan pilkada yang hanya sekedar ingin mendapatkan kekuasaan, persoalan

kualitas kepemimpinan adalah persoalan yang kedua, tetapi yang penting dan utama adalah bagaimana seorang kandidat bisa memenangkan kontestasi itu. Dalam konteks ini, seorang kandidat melihat dunia politik pilkada sebagai sebuah gelanggang persaingan politik yang perlu dimenangkan. Dunia politik tak ubahnya seperti arena bertarung yang membutuhkan strategi dan perencanaan yang matang dan terukur, agar bisa memenangkan pertarungan itu. Bahkan tak jarang kandidat tertentu melakukan cara-cara di luar koridor hukum, seperti melakukan politik uang, tebar sembako, dan berbagai upaya yang dilakukan guna merebut simpati pemilih. Oleh karena itu, proses Pilkada sering kali menjadi ajang pembuktian seberapa efektif strategi politik yang dimainkan oleh setiap kandidat sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi tersebut<sup>1</sup>.

Penelitian tentang strategi politik dan pemanfaatan modalitas, baik dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan bahkan pemilihan legislatif di tingkat daerah dan pusat, telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian itu, antara lain penelitian Baharuddin dan Titin. Hasil penelitian ini menemukan empat modalitas yang dominan dimiliki oleh Indah Putri Indriani dibandingkan dengan kandidat petahana. Modalitas tersebut adalah modal sosial, budaya, politik dan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Indah Putri Indriani sebagai seorang perempuan dan juga pendatang mampu mengakumulasi modal yang dimilikinya,

---

<sup>1</sup> Firmanzah (2008). Mengelola Partai Politik. Jakarta: Buku Obor. Hal 12

sehingga berhasil memenangkan sebuah kontestasi politik dan sekaligus berhasil menjadi bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan<sup>2</sup>.

Sedangkan penelitian Surahmadi (2016) tentang strategi politik pasangan Idjo-Nardjo di Pilkada Brebes tahun 2012. Hasil penelitiannya antara lain menyebutkan bahwa beberapa strategi yang dilakukan oleh kandidat pilkada, yaitu strategi merangkul partai lain, strategi membuat visi dan misi pemenangan berbasis kebutuhan masyarakat, membuat program dan menawarkan strategi pembangunan yang rasional dan terukur, membentuk tim sukses yang solid, membentuk struktur tim kampanye, membentuk tim sukses relawan, dan menggunakan konsultan politik sebagai lembaga yang dapat memberikan saran dan rekomendasi<sup>3</sup>.

Penelitian lain tentang strategi politik juga dilakukan Saifuddin, dkk (2018). Dengan menggunakan pendekatan teori permainan, penelitian ini menyoroti bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh para calon pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kandidat yang menggunakan strategi politik dengan cara memanfaatkan kesalahan dan kelemahan lawan dalam bertindak maupun dalam bertutur untuk menaikkan pamornya sehingga dapat merebut simpati pemilih<sup>4</sup>. Kajian serupa juga dilakukan Fatimah (2018) yang melihat kegagalan strategi politik kandidat, lebih disebabkan karena figur yang bersangkutan gagal membaca kekuatan dan kelemahan lawan politiknya.

---

<sup>2</sup> Baharuddin, Tawakkal dan Titin. Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Jurnal Governance And Public Policy*. Vol. 4 No. 1 (2017) hal. 205

<sup>3</sup> Surahmadi, Strategi Pemenangan Politik Pasangan Idza-Narjo Dalam Pemilihan Kabupaten Brebes Periode 2012-2017. *Jurnal Politika*, Vol. 7, No.2,(2016) hal. 91

<sup>4</sup> Saifuddin dkk. Penerapan Konsep Teori Permainan (*Game Theory*) Dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik. *E-Jurnal Matematika* Vol. 7 (2), (2018), pp. 173-179

Ketertarikan para peneliti dalam melakukan kajian tentang strategi politik dan pemanfaatan modalitas, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk tujuan praktis lainnya menunjukkan bahwa kajian dalam bidang ini dari berbagai perspektif, merupakan topik yang selalu menarik dan tetap relevan sampai saat ini. Selain itu, dinamika dan intrik politik pada kontestasi politik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat, tumbuh dan berkembang sangat dinamis dan senantiasa mewarnai kehidupan sosial dan politik di daerah, mulai dari yang halus sampai yang kasar; mulai dari yang tersirat sampai yang tersurat; bahkan mulai dari yang elegan sampai yang tidak bermartabat. Politik kadang memberikan “magnet” yang menjanjikan dalam perebutan kekuasaan atau berkuasa, sehingga semua aktor politik merasa memiliki kemampuan untuk memenangkan kontestasi politik khususnya pada aras lokal. Namun demikian, pada level ini para aktor seringkali melupakan kalkulasi-kalkulasi politik untuk memuluskan kemenangan sebagaimana harapannya<sup>5</sup>.

Strategi politik menjadi kunci penting dalam kontestasi politik. Sebagaimana adagium “kegagalan dalam merencanakan, sama bahayanya dengan sedang merencanakan kegagalan”. Strategi politik memegang peran yang sangat penting dalam setiap perhelatan pilkada. Karena itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran strategi politik yang dilakukan oleh figur pasangan **Saipul Mbuinga-Suharsi Igrisa (SMS)** dalam memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020 di kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

---

<sup>5</sup> Tinov, M. and Handoko, T. (2017). Strategi Politik: Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu di Aras Lokal. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 15, 25 (Mar. 2017), 53-64.

Beberapa argumentasi ilmiah yang mendasari mengapa pasangan “SMS” dijadikan objek kajian yang berkaitan dengan strategi politik, antara lain akan diuraikan penulis dalam tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.6 berikut ini.

**Tabel 1. 1**

**Data Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Pada Pemilu 2020**

| No     | Partai                                       | Jumlah Kursi | Persentase (%) |
|--------|--|--------------|----------------|
| 1      | Partai Golkar                                | 10           | 40 %           |
| 2      | Partai Kebangkitan Bangsa                    | 4            | 16 %           |
| 3      | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)     | 3            | 12 %           |
| 4      | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 2            | 8 %            |
| 5      | Partai Persatuan Pembangunan (PPP)           | 2            | 8 %            |
| 6      | Partai Demokrat                              | 2            | 8 %            |
| 7      | Partai Amanat Nasional (PAN)                 | 1            | 4 %            |
| 8      | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)              | 1            | 4 %            |
| Jumlah |  | <b>25</b>    | 100%           |

*Sumber: DPRD Kabupaten Pohuwato, diolah tahun 2021*

Berdasarkan data tentang komposisi perolehan kursi masing-masing partai politik di DPRD Kabupaten Pohuwato sebagaimana diuraikan pada tabel 1.1, dan merujuk ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka satu-satunya partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengusung calon Bupati tanpa perlu membangun koalisi dengan partai politik lainnya hanya partai Golkar.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Namun demikian, sekalipun perolehan kursi di legislatif melampaui persyaratan yang ditentukan undang-undang, partai Golkar justru terkesan tidak “percaya diri” mengusung kadernya sendiri. Pada tahap awal, partai Golkar sangat yakin untuk mengusung kadernya dengan tetap membuka kesempatan partai politik lainnya untuk berkoalisi. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang diberikan kepada kader Golkar sekaligus anggota legislatif atas nama **Iwan Adam**. Surat tugas dengan Nomor: ST.71/DPP.GOLKAR/III/2020 tersebut intinya, yaitu: *pertama*, perintah untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka kepentingan Pilkada serentak 2020. *Kedua*, membangun komunikasi dengan bakal calon wakil kepala daerah guna menentukan pasangan yang akan diusung oleh partai Golkar. Berdasarkan surat tugas tersebut, Iwan Adam telah menemukan pasangan bakal calon wakil Bupati, yaitu Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang notabene partai ini memperoleh 1 kursi di Legislatif. Namun menjelang detik terakhir batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon di KPUD Kabupaten Pohuwato, pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar justru membuat manuver, dengan memberikan rekomendasi kepada calon lain dalam hal ini **Saipul Mbuinga** yang

notabene bukan kader partai Golkar. Keputusan tersebut tentu mengejutkan banyak pihak terutama para kader Golkar, termasuk Iwan Adam yang merasa telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak DPP Golkar sebagaimana dalam surat tugas yang diterbitkan sebelumnya.

Berdasarkan dinamika yang terjadi di internal partai politik sebagaimana dijelaskan di atas, maka peta dukungan partai politik terhadap calon Pilkada telah berubah dari perkiraan sebelumnya. Termasuk keputusan majunya dua kader partai Golkar yang juga sekaligus anggota legislatif di DPRD Kabupaten Pohuwato dalam ajang pertarungan politik tersebut, dan tidak melalui partai Golkar. Adapun sebaran dukungan partai politik dan calon perseorangan dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1. 2**

**Peta Dukungan Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Pohuwato Tahun 2020**

| No | Pasangan Calon                          | Partai Pendukung   | Latar Belakang Profesi  | Persentase Dukungan |
|----|---|--|---|---------------------|
| 1  | Hamdi Alamri-Zairin<br>T.D. Maksud      | Perseorangan   | Anggota DPRD<br>Partai Golkar-<br>Birokrat  | -                   |
| 2  | Ibrahim Bouty-Miswar<br>Yunus           | Perseorangan   | Birokrat-<br>Pengusaha  | -                   |
| 3  | Iwan Sjafrudin Adam-<br>Zunaidi Z Hasan | 1. PKB<br>2. PKS   | Anggota DPRD<br>Partai Golkar-<br>Pengusaha   | 20 %                |
| 4  | Saipul A Mbuinga-<br>Suharsi Igrisa     | 1. Partai Golkar<br>2. Partai<br>Gerindra<br>3. PPP<br>4. Demokrat<br>5. PAN | Anggota DPRD<br>Kab. Partai<br>Gerindra-<br><br>Anggota DPRD<br>Prov. Partai Golkar | 80%                 |

*Sumber: KPU Kab. Pohuwato, diolah tahun 2021*

Berdasarkan peta koalisi partai dengan pasangan calon yang diusung sebagaimana tabel 1.2, menunjukkan kandidat Saipul Mbuinga telah berhasil memperoleh dukungan mayoritas partai politik. Sosok Saipul Mbuinga adalah kader partai Gerindra yang perolehan kursinya di legislatif Kabupaten Pohuwato hanya 12 %. Dengan suksesnya strategi Saipul Mbuinga dalam memperoleh dukungan mayoritas partai politik, maka dapat dikatakan bahwa fakta tersebut relevan dengan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tahun 2018, yang menyatakan bahwa fenomena borong partai politik dan kuatnya pengaruh elit tertentu di tingkat lokal jamak mewarnai praktik pilkada langsung saat ini.

Fenomena lain yang menarik untuk dikaji dari sosok **Saipul Mbuinga** adalah dari sisi kemampuan sumber daya ekonomi. Figur yang mendapat dukungan mayoritas partai pemilik kursi di parlemen ini, dipandang “tidak potensial” bila dibandingkan dengan calon lainnya. Bahkan dengan bakal calon yang sebelumnya telah berusaha mendapatkan dukungan partai politik, namun gagal. Hal ini dapat dilihat dari laporan harta kekayaan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang nilainya dilaporkan minus. Berdasarkan laporan itu pula, KPK menempatkannya sebagai calon Bupati “termiskin” nomor 4 (empat) pada Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia. Menurut data dari KPK, Saipul Mbuinga melaporkan harta kekayaan minus Rp 702.128.300 (*Tujuh ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*)<sup>6</sup>.

Uraian selengkapnya calon kepala daerah “termiskin” tahun 2020 berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup><https://www.liputan6.com/pilkada/read/4425429/daftar-10-calon-kepala-daerah-terkaya-dan-termiskin-di-pilkada-2020-versi-kpk>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

**Tabel 1. 3**  
**Daftar Calon Kepala Daerah “Termiskin” di Indonesia**  
**Pada Pilkada Serentak Tahun 2020**

| No | Nama Calon              | Kedudukan    | Daerah          | Jumlah Harta Kekayaan (-) |
|----|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 1  | Indra Gunalan           | Cawabup      | Sijunjung       | Rp.-3.550.090.050         |
| 2  | Bong Ming Ming          | Cawabup      | Bangka Barat    | Rp -990.711.186           |
| 3  | Tri Suryadi             | Cabup        | Padang Pariaman | Rp -998.000.000           |
| 4  | <b>Saipul A Mbuinga</b> | <b>Cabup</b> | <b>Pohuwato</b> | <b>Rp -702.128.300</b>    |
| 5  | Solihin                 | Cabup        | Indramayu       | Rp -667.024.043           |
| 6  | Afif Nurhidayat         | Cabup        | Wonosobo        | Rp -666.000.000           |
| 7  | Hamdanus                | Cawabup      | Pesisir Selatan | Rp -295.890.837           |
| 8  | Untung Tamsil           | Cabup        | Fakfak          | Rp -212.308.888           |
| 9  | Herman                  | Cabup        | Tanah tidung    | Rp -194.000.000           |
| 10 | Ferizal Ridwan          | Cabup        | Limapuluh Kota  | Rp -121.719.928           |

*Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi. Data diolah tahun 2021*

Data laporan harta kekayaan para kandidat kepala daerah, sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.3 diatas, maka apabila disandingkan antara dukungan partai politik yang mayoritas diberikan kepada figur Saipul Mbuinga dengan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, maka adagium politik **“tidak ada makan siang gratis”** patut dikesampingkan sementara. Walaupun analisis Mietzner (2007) menyatakan bahwa aksi “jual-beli” tiket dalam Pemilukada oleh partai politik kepada aktor eksternal, sesungguhnya benar-benar terjadi. Aktor-aktor eksternal, menurut Mietzner dipandang mampu menyediakan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan partai politik. Berdasarkan analisis ini maka modalitas ekonomi menjadi dimensi utama untuk mendapat dukungan dari partai politik.

Dalam kaitan dengan pelaporan harta kekayaan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf J dengan tegas menyebutkan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Oleh karena itu, laporan harta kekayaan para calon Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 4**  
**Daftar Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah**  
**Kabupaten Pohuwato Pada Pilkada Serentak**  
**Tahun 2020**

| No | Nama Calon              | Jumlah Harta Kekayaan    |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1  | Hamdi Al Amri           | <b>Rp. 580.718.066</b>   |
| 2  | Ibrahim Ben Bella Bouty | <b>Rp.14.534.900.000</b> |
| 3  | Iwan Sjafruddin Adam    | <b>Rp. 1.609.179.981</b> |
| 4  | <b>Saipul Mbuinga</b>   | <b>Rp. -702.128.300</b>  |

*Sumber Data: KPU Kabupaten Pohuwato Tahun 2021*

Berdasarkan fenomena dan realitas dominasi dukungan partai politik, potensi ekonomi yang dimiliki, serta latar belakang afiliasi partai politik terhadap figur **Saipul Mbuinga**, dan disandingkan dengan analisis Mietzner (2007), menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dan mendalam untuk memahami realitas

yang terjadi di balik fenomena tersebut. Hal ini karena dalam upaya pemenangan kontestasi Pilkada, dana politik adalah aspek yang juga sangat penting dan menentukan dalam menunjang strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Modalitas ekonomi bagi setiap kandidat sangat diperlukan guna membiayai semua aktivitas pada setiap tahapan-tahapan Pilkada yang dilalui oleh kandidat dan tim pemenangannya<sup>7</sup>.

Disisi lain, dalam literatur ilmu politik, telah banyak mengulas tentang beberapa model pendekatan dalam melihat bagaimana perilaku partai politik dalam pengambilan keputusan untuk mengusung kandidat dalam Pilkada. Menurut Mujani (2012), setidaknya terdapat tiga pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis perilaku partai politik. Ketiga pendekatan tersebut antara lain: *Pertama*, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini melihat bahwa karakteristik sosiologis menjadi dasar pertimbangan partai dalam mengusung calon kandidat. Pertimbangan sosiologis tersebut yaitu agama, ras atau suku, kelas sosial dan kedaerahan. *Kedua*, pendekatan psikologis. Menurut pendekatan psikologis, partai politik tidak menganggap penting latar belakang sosiologis calon kandidat seperti agama, status sosial dan ekonomi, ras atau suku serta pendapatan. Mereka umumnya melihat bahwa faktor-faktor ini tidak cukup untuk memenangkan paslon pada saat pemilu. Terkait dengan hal ini, partai politik lebih melihat pada kedekatan paslon terhadap partai, dalam hal ini keaktifan individu pada kegiatan-kegiatan partai sebelumnya. *Ketiga*, pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini melihat bahwa pertimbangan ekonomi dan politik merupakan faktor penting bagi partai politik untuk mendukung

---

<sup>7</sup> Mietzner, Marcus. (2007). "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption." *Contemporary Southeast Asia* 29 (2):238-263

paslon. Model ini merupakan kritik terhadap model sebelumnya yaitu sosiologis dan psikologis<sup>8</sup>.

Menurut pendekatan pilihan rasional, partai politik memilih calon kandidat berdasarkan perilaku rasional. Perilaku rasional dilakukan dengan cara menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Partai politik kemudian menghitung untung rugi dalam mendukung paslon. Jika mereka melihat bahwa paslon tertentu lebih menguntungkan dibandingkan yang lain, maka partai tersebut akan mendukung mereka.

Selain laporan harta kekayaan pribadi yang wajib disampaikan oleh setiap kandidat pilkada, juga adanya kewajiban tentang pelaporan dana kampanye bagi setiap calon untuk disampaikan ke KPU yang selanjutnya di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk. Pembahasan tentang dana kampanye dalam tulisan ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara strategi kampanye dan pembiayaan kampanye dari calon itu sendiri. Tabel berikut ini menguraikan jumlah dana kampanye yang digunakan masing-masing calon pada Pilkada Kabupaten Pohuwato tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.

---

<sup>8</sup> Mujani, Saiful Dan William L (2011). Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif Dan Presiden Pasca Orde Baru. Bandung: Mizan. Hal. 6-27

**Tabel 1. 5**  
**Laporan Dana Kampanye Calon Kepala Daerah**  
**Kabupaten Pohuwato**  
**Pada Pilkada Serentak Tahun 2020**

| No. | Pasangan                                   | Penerimaan         | Pengeluaran        | Hasil Audit  |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1   | Hamdi Alamri – Zairin TD<br>Maksud         | 166.401.000        | 165.431.000        | Tidak Patuh  |
| 2   | Ibrahim Bouty – Miswar<br>Yunus            | 37.462.848         | 37.462.848         | Patuh        |
| 3   | Iwan S Adam – Zunaidi Z<br>Hasan           | 77.500.000         | 77.500.000         | Patuh        |
| 4   | <b>Saipul Mbuinga –<br/>Suharsi Igrisa</b> | <b>438.159.784</b> | <b>438.133.358</b> | <b>Patuh</b> |

*Sumber: KPU Kabupaten Pohuwato Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, menunjukkan jumlah nominal dana kampanye yang dikeluarkan oleh setiap kandidat berbanding terbalik dengan besaran harta kekayaan calon. Sebagaimana yang diuraikan pada tabel 1.4, kandidat Ibrahim Ben Bella Bouty memiliki kekayaan tertinggi diantara calon lainnya dengan total harta mencapai **Rp.14.534.900.000**. Namun dalam hal pengeluaran dana kampanye paling rendah, yakni sebesar **Rp. 37.462.848**. dan sebaliknya kandidat Saipul Mbuinga, yang memiliki harta kekayaan paling terendah yakni sebesar **Rp. - 702.128.300 (minus)**, justru pengeluaran dana kampanyenya paling tertinggi diantara calon lainnya, yaitu sebesar **Rp.438.133.358**.

Fenomena lain yang menarik untuk dikaji dari sosok Saipul Mbuinga adalah munculnya sinyalemen yang mengaitkan kemenangannya dalam pemilihan bupati tahun 2020 karena praktik politik dinasti. Sebagaimana diketahui bahwa sosok Saipil Mbuinga adalah kakak kandung dari Bupati Syarif Mbuinga yang masih menjabat

bupati. Namun Saipul Mbuinga sendiri membantah dengan tegas anggapan itu. Menurutnya, setidaknya beberapa argumentasi yang bisa mematahkan anggapan itu, antara lain: **pertama**. Apabila keputusan partai Golkar mengusung dirinya, hingga keterpilihannya menjadi Bupati karena terdapat hubungan kekerabatan dengan Bupati saat itu, maka mestinya sejak awal pilihan politiknya bergabung dengan partai Golkar besutan kerabatnya itu agar selama dua periode di DPRD dapat menduduki kursi ketua DPRD. Tetapi faktanya Saipul Mbuinga justru dua periode menjadi wakil ketua DPRD dari Partai Gerindra, yang notabene berbeda partai dengan kerabatnya selama dua periode kepemimpinannya. **Kedua**, Apabila perolehan dukungan mayoritas partai pengusung karena faktor kekerabatan keluarga, maka seyogyanya hanya dua partai yang memberikan dukungan, yaitu partai Gerindra pimpinan Saipul Mbuinga, dan Partai Golkar pimpinan sang adik Syarif Mbuinga. Tetapi kenyataannya justru beberapa partai selain Golkar dan gerindra yang juga memberikan dukungan.

Berdasarkan penegasan Saipul Mbuinga tersebut, maka penting untuk mengkaji tentang modalitas yang dimiliki sehingga mayoritas partai memutuskan untuk memberikan dukungan kepadanya. Perspektif teori modalitas yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosok Saipul Mbuinga dalam Pilkada, adalah teori yang modal yang digagas Bourdeau. Bourdieu mengatakan bahwa modal berperan sebagai sebuah hubungan sosial yang terdapat didalam suatu sistem pertukaran, dan istilah pertukaran diperluas pada segala bentuk barang baik material maupun

simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai suatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu<sup>9</sup>.

Lazimnya sistem pemilihan umum langsung seperti yang diterapkan Indonesia, paling tidak membutuhkan tiga modal (*capital*) sebagai prasyarat agar seseorang kandidat dapat terpilih. Ketiganya saling melengkapi, meski bukan berarti akan gagal total jika salah satunya mengalami kekurangan. Ketiga modal tersebut adalah modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), dan modal budaya (*cultural capital*). Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan pada tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.5 diatas, maka hasil perolehan suara pada pemilihan bupati di kabupaten pohuwato tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1. 6**  
**Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon**  
**Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato**  
**Pada Pilkada Serentak Tahun 2020**

| No    | Pasangan Calon                             | Jumlah Suara   | %            |
|-------|--|----------------|--------------|
| 1     | Hamdi Alamri – Zairin TD<br>Maksud         | 10.474         | 11.58        |
| 2     | Ibrahim Bouty – Miswar<br>Yunus            | 15. 605        | 17.25        |
| 3     | Iwan S Adam – Zunaidi Z<br>Hasan           | 27. 200        | 30.06        |
| 4     | <b>Saipul Mbuinga – Suharsi<br/>Igrisa</b> | <b>37. 190</b> | <b>41.11</b> |
| Total |  | <b>90.469</b>  | <b>100</b>   |

Sumber: KPU Kabupaten Pohuwato, tahun 2021

<sup>9</sup> Fauzi, Fashri (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol : Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jogjakarta : Juktapose. Hal. 64

Mencermati hasil perolehan suara akhir sebagaimana pada tabel 1.6 menunjukkan selisih perolehan suara antara pasangan **Saipul Mbuinga** kandidat yang diusung oleh mayoritas partai, dengan pasangan **Iwan S. Adam** (kader Golkar yang gagal diusung partai Golkar) hanya terpaut 9.990 suara atau sebesar 11 %. Berdasarkan fenomena ini, maka menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama berkaitan dengan strategi figur Saipul Mbuinga dalam meyakinkan partai politik pengusung, dan strategi memenangkan pemilihan Pilkada. Sekalipun dalam pandangan sebagian kalangan antara perolehan suara akhir, tidak berbanding lurus dengan jumlah dukungan mayoritas partai politik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasangan Saipul Mbuinga-Suharsi Igrisa (SMS) dalam upaya pemenangan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi yang dilakukan oleh kandidat pasangan Saipul Mbuinga-Suharsi Igrisa pada Pilkada tahun 2020, yang dijabarkan melalui:

1. Strategi pembentukan popularitas
2. Strategi kandidasi,
3. Strategi pembentukan koalisi dukungan partai politik
4. Strategi kampanye politik

5. Strategi pemanfaatan modalitas yang dimiliki.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis dan Akademis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya berkaitan dengan strategi politik dan teori-teori modal yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik dalam pengembangan kajian kepemiluan khususnya kajian tentang koalisi partai dan modalitas kandidat dalam arena kontestasi Pilkada.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi bahan rujukan kepada pihak lain yang berminat memahami dan mengkaji permasalahan strategi calon dalam pelaksanaan Pilkada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi *stakeholder* kepemiluan dan pengambil kebijakan lainnya dalam memahami dinamika pemilihan kepala daerah langsung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang strategi politik, proses kandidasi, teori koalisi, strategi kampanye, strategi pemanfaatan modal, dan hakikat pemilihan kepala daerah langsung, serta kerangka pemikiran. Ulasan teori tersebut dimaksudkan sebagai landasan ilmiah dalam mengkaji fakta empiris di lapangan, terutama yang berkaitan dengan topik utama dari riset ini.

#### **A. Teori Tentang Strategi Politik**

Kata strategi mengandung arti sebagai suatu ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya (bangsa-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi dapat juga bermakna sebagai ilmu dan seni memimpin pasukan tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dan dalam kondisi yang menguntungkan. Sebagai contoh komandan yang dasarnya memang menguasai betul strategi di medan perang. Strategi juga bermakna rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Makna lain dari strategi adalah tempat yang baik menurut siasat perang<sup>10</sup>

Strategi pada awalnya berasal dari konsep militer, yang diadopsi dari bahasa Yunani. Dalam perkembangan selanjutnya, saat berbagai aktivitas manusia dan pertimbangan-pertimbangan strategis yang senantiasa memainkan peranan ketika sekelompok besar orang butuh dipimpin dan diberi pengarahan. Di masa lalu, ada

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>. Diakses tanggal 2 Agustus 2022

banyak prospek perang yang menciptakan kebutuhan ini. Hingga awal industrialisasi, istilah strategi masih dipakai sebatas konotasi militer saja. Namun seiring perkembangan zaman, setelah berbagai aktivitas manusia yang memerlukan kepemimpinan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitasnya, maka sejak itu pengertian tentang strategi menjadi meluas, dan lahirlah strategi manajerial untuk memudahkan pengelolaan orang-orang dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, sedikit demi sedikit konsep strategi makin meluas ke berbagai aspek masyarakat, termasuk, tentu saja ke bidang politik. Politik juga bertujuan memimpin kelompok-kelompok besar masyarakat atau anggota partai politik dan organisasi ke arah sasaran khusus<sup>11</sup>.

Dalam bentuknya yang paling murni, strategi semata-mata berurusan dengan isu-isu militer. Dalam masyarakat sebelumnya, seorang raja atau pemimpin politik sering kali sebagai pemimpin militer. Pada masa sekarang pun, penerapan strategi sangat dekat dengan asumsi pada awal kemunculannya, sekalipun hal tersebut diterapkan bukan pada dunia militer. Sebagai contoh dalam dunia ekonomi, strategi masih sering diasumsikan dengan bagaimana cara mengalahkan kompetitor, bagaimana bisa menguasai pasar, dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia olah raga, strategi juga diasumsikan dengan bagaimana cara mengalahkan lawan bertanding kita.

Transformasi penggunaan strategi dari dunia militer ke dunia politik didasarkan pada asumsi bahwa dunia politik memiliki banyak kemiripan dengan dunia militer. Dalam dunia militer strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang

---

<sup>11</sup> Schröder, Peter. 2013, Strategi Politik. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung Fur die Freiheit. Hal.21

dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia politik. Persaingan telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah. Baik institusi maupun aktor politik dituntut untuk menerima normalnya persaingan dalam dunia politik. Menurut Nietzsche sudah menjadi kodrat manusia harus mengusung kehendak untuk berkuasa dan merepresentasikan diri dalam pola-pola persaingan di setiap level kehidupan. Antara yang ingin berkuasa dan yang tidak rela dikuasai memberi energi dan motivasi untuk bersaing. Pihak yang berkuasa memiliki hak dan otoritas yang lebih dibanding dengan yang tidak berkuasa<sup>12</sup>.

Berdasarkan transformasi strategi tersebut, maka dapat diuraikan bahwa strategi politik adalah pendekatan politik yang dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Untuk dapat memenangkan persaingan, maka diperlukan berbagai macam strategi politik diantaranya: (1) Strategi penguatan. Strategi ini digunakan agar ikatan rasional dan emosional antara kontestan dan calon pemilih tetap terjaga. (2) Strategi menanamkan keyakinan. Strategi ini diterapkan pada pemilih yang non partisan dengan meyakinkan bahwa kontestan yang bersangkutan lebih baik dibanding pesaingnya. (3) Strategi pengenalan dan merebut. Strategi ini dilakukan terhadap pemilih yang mendukung partai lain<sup>13</sup>.

Strategi politik adalah suatu cita-cita politik yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah dalam strategi politik, yakni : (a.) merumuskan

---

<sup>12</sup> Firmanzah (2008). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal.128-130

<sup>13</sup> Firmanzah, (2008). *Ibid Hal.26*

misi, (b.) perumusan sasaran, (c.) implementasi strategi, dan (d.) pengendalian strategi. Schroder menjelaskan secara umum ada dua macam strategi, yakni: (1) Strategi ofensif (menyerang), dan (2) Strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif dilakukan dengan menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara diri dengan lawan politik. Strategi ini digunakan untuk menerapkan kebijakan harus menjual atau menampilkan perbedaan terhadap *status quo* atau keadaan yang berlaku saat itu dan menyoroti keuntungan-keuntungan yang diharapkan darinya. Sedangkan strategi defensif (bertahan) yaitu apabila partai politik yang berkuasa atau koalisi pemerintahan ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar (politik) hendak dipertahankan. Strategi politik ini juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau akan ditutup<sup>14</sup>. Namun demikian, dari dua macam strategi yang dirumuskan Schroder tersebut masih diuraikan dalam berbagai sub-sub strategi.

Pembahasan tentang “strategi” dan “persaingan” dalam konteks politik adalah dua dimensi yang eksistensinya dalam ajang Pilkada memiliki hubungan kausalitas. Munculnya “strategi” karena konsekuensi logis dari hasrat untuk memenangkan “persaingan”. Dalam konteks ini, maka istilah strategi awalnya sering digunakan dalam dunia militer karena identik dengan hasrat memenangkan pertempuran. Menurut Schroder, dimensi strategi senantiasa memainkan peranan ketika sekelompok besar orang butuh dipimpin dan diberi pengarahan. Di masa lalu, ada banyak prospek perang yang menciptakan kebutuhan tentang strategi ini. Hingga awal masa industrialisasi, istilah strategi masih dipakai sebatas konotasi militer saja. Namun seiring perkembangan zaman, pengertian strategi meluas, dan

---

<sup>14</sup> Schroder. Op cit hal.114

lahirlah strategi manajerial untuk memudahkan pengelolaan orang-orang dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, secara bertahap konsep strategi makin meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk, tentu saja ke bidang politik. Politik juga bertujuan memimpin kelompok-kelompok besar masyarakat atau anggota partai politik dan organisasi ke arah sasaran khusus yang ingin dicapai<sup>15</sup>.

Munculnya persaingan politik merupakan “kodrat alamiah” yang harus ditempuh untuk mencapai kekuasaan. Karena pemenangnya hanya satu, yakni individu atau kelompok, maka sangat wajar bila masing-masing pihak berlomba-lomba untuk menjadi pemenang di setiap ajang kompetisi. Oleh karena itu, kompetisi politik akan berakhir dengan munculnya dukungan luas terhadap perjuangan suatu kelompok politik atau individu. Apabila kompetisi berada dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah misalnya, maka pemenangnya adalah partai politik atau individu yang mendapatkan suara terbanyak<sup>16</sup>.

Rasionalitas dibalik terjadinya persaingan dalam ranah politik adalah adanya konsep kelangkaan (*scarcity*). Konsep kelangkaan hadir karena pemenang akhir dari persaingan umumnya tunggal dan mutlak. Sehingga persaingan politik acap kali mendorong setiap pihak yang berkompetisi untuk terus membangun strategi dan berusaha melahirkan inovasi politik. Inovasi politik dapat diartikan sebagai sebuah temuan ataupun perbaikan atas isu-isu dan program kerja politik yang disesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang terjadi dalam masyarakat.

Persaingan politik yang bebas, terbuka, transparan dan adil telah menjadi keharusan dalam iklim demokrasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Namun,

---

<sup>15</sup> Schroder (2013) ibid hal 31

<sup>16</sup> Firmanzah (2008) op cit hal. 126

kendati kehadirannya secara prosedural sudah ada, tetapi tidak berarti pihak-pihak yang berkompetisi telah mengikutinya dengan patuh. Hal ini karena sangat bergantung pada seberapa besar kesadaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam berkompetisi akan pentingnya sistem yang adil, terbuka, dan transparan<sup>17</sup>.

Ditengah hadirnya iklim yang semakin terbuka seperti saat ini, “persaingan” merupakan sesuatu yang wajar saja terjadi. “Menormalkan” persaingan berarti menerima kenyataan bahwa masing-masing pihak memiliki probabilitas untuk memenangkan persaingan. Karena bagaimanapun, persaingan tetap dibutuhkan untuk meningkatkan proses belajar partai politik ataupun individu. Dorongan untuk terus belajar merupakan fungsi dari tingkat kompetisi yang berlangsung. Semakin tinggi tingkat kompetisi, biasanya tekanan untuk terus belajar pun akan semakin tinggi. Muara dari “persaingan” tidak sekedar konsekuensi logis dari perubahan zaman, melainkan memang diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam persaingan politik. Dengan demikian, maka hasil belajar akan melahirkan berbagai strategi politik guna menghadapi persaingan politik berikutnya<sup>18</sup>.

Berdasarkan uraian tentang strategi politik sebagaimana dikemukakan Firmanzah di atas, maka esensi strategi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik. Kehadiran strategi dalam politik karena berangkat dari fenomena atas perkembangan demokrasi saat ini, yang cenderung menempatkan politik sebagai industri yang makin diminati banyak orang. Sekalipun demikian, industri politik tentu perlu didudukkan pada konteks yang sedikit berbeda dengan pemahaman industri

---

<sup>17</sup> Ibid hal.127

<sup>18</sup> Ibid hal. 126

dalam bidang ekonomi atau perdagangan. Menggolongkan politik sebagai sebuah industri, karena berangkat dari pemikiran dasar bahwa sejak kelahirannya politik oleh sebagian kalangan, dianalogikan sebagai suatu industri yang telah menghasilkan banyak produk sebagaimana dikenal di seluruh dunia, dan di antara produk itu adalah demokrasi. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa dalam industri politik, harga demokrasi ternyata sangat mahal. Jika seorang ingin berinvestasi dalam pasar demokrasi, maka perlu persiapan modal yang cukup serta pembacaan strategi politik yang cermat<sup>19</sup>.

Bagi para pemain politik, pemahaman atas strategi politik menjadi penting guna menentukan momentum kapan harus mengambil tindakan, dan kapan harus mengakhiri sebuah tindakan politik. Dalam konteks ini, strategi politik dapat dimaknai sebagai suatu kerangka rencana yang kemungkinan bisa merugikan atau bisa pula menguntungkan kelompok lain. Oleh karena itu, strategi politik didesain untuk mencapai tujuan tertentu, membuat dan menyelesaikan konflik, bahkan mengacaukan situasi atau untuk memperkuat posisi kekuatan serta menciptakan stabilitas nasional. Strategi politik bisa menjadi fungsional bagi masyarakat apabila memberi keuntungan bagi masyarakat. Dengan demikian, maka suatu strategi politik bisa saja berbentuk penyimpangan terhadap apa yang dianggap masyarakat bukan penyimpangan<sup>20</sup>.

Strategi meliputi kerangka tindakan yang direncanakan untuk dilakukan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran tertentu. Kerangka tindakan tersebut dapat

---

<sup>19</sup> Mage, Ruslan Ismail. (2009). *Industri Politik: Strategi Investasi Politik Dalam Pasar Demokrasi*. Jakarta: Rmbooks. Hal. 121

<sup>20</sup> Hidajat, Imam. (2009). *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press. Hal 117.

diwujudkan dalam berbagai program kegiatan yang sistematis serta multi dimensional. Dalam dunia militer, strategi dibedakan dari taktik. Strategi terkait dengan prinsip-prinsip putusan yang dijadikan pedoman dalam berbagai skenario/kondisi/kemungkinan yang terjadi. Sedangkan taktik sudah menyangkut operasionalisasi dari prinsip-prinsip tersebut di lapangan. Sebagai contoh, bagaimana sebuah pertempuran dilakukan, itu adalah masalah taktik. Strategi berbicara tentang syarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk memutuskan bertempur atau tidak sama sekali. Jadi strategi adalah dasar dari taktik. Strategi adalah koridor dalam mana taktik tidak boleh melampauinya. Itulah sebabnya dalam perencanaan, sering dikaitkan dengan horizon waktu jangka panjang, sementara taktik adalah terkait aktivitas sehari-hari<sup>21</sup>

Urgensi strategi dalam politik, karena politik itu sendiri dipandang mengandung dimensi violatif. Karena memiliki dimensi violatif, maka politik seringkali rentan dengan kekerasan, manipulasi, intrik-intrik, strategi kotor, ketidakadilan sistematis, kerancuan dan kekacauan. Pelanggaran politik kerap dimaknai secara *blunt* sebagai bagian dari aktivitas berpolitik. Dimensi violatif nyata, namun seringkali tidak disadari. Tidak ada politik yang tetap sepanjang segala masa. Karena itu, setiap tujuan politik yang digariskan memiliki karakter imajinatif. *Bonum commune* (atau kesejahteraan) itu imajinatif, tidak ada representasi mutlak tentang seperti apa dan bagaimana kesejahteraan itu dibangun.

Dalam tataran praktik, keberhasilan suatu strategi politik menurut David Easton, sangat tergantung pada tingkat kepuasan yang diusahakan, atau output

---

<sup>21</sup> Hidajat (2009) op cit 118

yang dikeluarkan. Dalam strategi *money politics* misalnya, pihak lain atau objek sasaran akan memilih output yang lebih besar dan menguntungkan. Keberhasilan ini juga akan terjadi apabila mereka berhasil mengadakan pendekatan-pendekatan, pembinaan-pembinaan yang dilandasi sikap emosional historis, yaitu sejarah hidup, latar belakang, kesetiaan primordial seperti adat, suku, daerah, keagamaan, dan ideologis<sup>22</sup>.

Dimensi strategi politik, menurut Schroder hakikatnya adalah sebuah rencana yang digunakan dalam rangka merealisasikan cita-cita politik. Oleh karena itu, dalam konteks Pilkada, strategi politik digunakan sebagai cara untuk memenangkan kontestasi. Dari pandangan ini jelas bahwa strategi merupakan segala rencana dan tindakan yang dilaksanakan untuk memperoleh kemenangan dalam konteks pertarungan di panggung politik yang bernama pilkada<sup>23</sup>. Oleh karena itu, bila seorang kandidat dapat meraih kemenangan dalam sebuah kontestasi, maka sedapat mungkin harus mampu membuat pemilih berpihak dan memberikan suara kepadanya. Pada tataran inilah kemudian strategi digunakan untuk menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh serta mengetahui metode pendekatan yang paling efektif dan efisien terhadap pemilih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan akhir dan utama yaitu “kemenangan”.

Berbagai strategi yang dapat dilakukan guna memenangkan persaingan politik, antara lain adalah: ***Pertama***, analisis pesaing. *Positioning* politik tidak dapat dilakukan tanpa analisis pesaing. Karena dalam *positioning* terkandung makna

---

<sup>22</sup> Schroder (2013) op cit hal.115

<sup>23</sup> Ibid hal 117

diferensiasi. Diferensiasi adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk membedakan diri kita sendiri dengan yang lain. Antara “*us*” dan “*others*”. Esensi dari diferensiasi adalah identitas. Sebuah kesatuan atribut dan karakteristik politik yang mampu digunakan sebagai penanda politik yang sekaligus juga sebagai pembeda politik antara satu kandidat dengan kandidat lain, atau suatu partai dengan partai lainnya. **Kedua**, strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik suatu partai atau kandidat terhadap masyarakat dan media massa perlu sekali dianalisis oleh lawan politiknya. Komunikasi intensif yang dilakukan oleh suatu kandidat atau partai politik menandakan agresivitas pesaing dalam menanamkan suatu *image* dan kesan tertentu dalam benak masyarakat. Ketika partai politik atau kandidat mengungkap permasalahan pengangguran dan dikomunikasikan secara massif, maka paling tidak ada keinginan dari partai tersebut untuk membangun *image* bahwa masalah pengangguran adalah hal penting bagi mereka, dan mereka ingin mengaitkan *image* kepedulian terhadap pengangguran untuk identitas politik mereka.

Strategi **ketiga**, menurut Firmanzah adalah strategi lobi politik. Berpolitik berarti membangun *bargaining power* dan kekuatan. Jarang sekali hal ini dilakukan secara sendirian. *Bargaining power* dan kekuatan politik sering kali diperoleh dari aliansi dengan partai atau kandidat lain. Tentu saja secara ideal, pilihan atas partai atau kandidat yang hendak diajak beraliansi tidak hanya terfokus pada keinginan untuk memenangkan persaingan politik. Sedangkan strategi **keempat** adalah strategi isu politik. Dalam strategi ini, hal yang perlu dilakukan adalah terus menerus memonitor cara pesaing dalam membangun isu politik mereka. Sebab isu politik akan menentukan *positioning* pesaing. Misalnya, ketika suatu partai politik atau

kandidat mengangkat isu tentang lingkungan hidup, kita dapat melihat kepedulian partai atau kandidat tersebut terhadap hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan hidup<sup>24</sup>.

Dengan berbagai strategi dan dinamika, serta intrik-intrik politik disetiap kontestasi politik pada momentum Pilkada, menjadi penanda bahwa iklim politik yang tumbuh dan berkembang sangat mewarnai kehidupan sosial dan politik di daerah. Dari cara-cara yang halus sampai cenderung kasar; dari yang tersirat sampai yang tersurat; bahkan mulai dari yang elegan sampai yang tidak bermartabat. Tapi apapun bentuknya politik memang memberikan “magnet” yang menjanjikan untuk merebut kekuasaan atau berkuasa. Dan semua aktor politik merasa memiliki kemampuan untuk memenangkan kontestasi politik khususnya pada wilayah lokal, tergantung pada bagaimana memainkan strateginya.

Berdasarkan uraian tentang teori-teori strategi dalam politik baik yang dikemukakan oleh Scrooder maupun yang dikemukakan oleh Firmanzah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari strategi adalah keseluruhan upaya atau keputusan yang sifatnya kondisional perihal tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.

Dalam konteks Pilkada, strategi memiliki tujuan akhir yakni kemenangan. Kemenangan akan tetap menjadi fokus yang tercermin melalui mandat rakyat untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, strategi sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan oleh setiap orang, maka hakekatnya bersifat kondisional atau fleksibel. Dalam kaitannya dengan fokus penelitian ini, peneliti

---

<sup>24</sup> Firmanzah (2008) op cit hal 209-245

berusaha menggali keseluruhan langkah yang dilakukan oleh pasangan kandidat untuk mendapatkan kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, yang tidak menutup kemungkinan beberapa upaya yang dilakukan telah mengadopsi teori strategi yang dirumuskan Scrooder dan juga yang telah dirumuskan oleh Firmanzah.

## **B. Pembentukan Koalisi Partai Dalam Mengusung Kandidat Pilkada**

Dalam konteks sejarah, teori mengenai koalisi secara umum memang tumbuh dalam tradisi demokrasi parlementer dan sifatnya sangat kental dengan koalisi pada level nasional. Tetapi sekalipun demikian, bangunan teori koalisi sifatnya general, sehingga tidak berarti teori tersebut hanya dapat digunakan untuk menjadi alat bantu dalam menganalisis koalisi pada level nasional semata. Tetapi juga bisa digunakan untuk menganalisis koalisi politik di tingkat lokal<sup>25</sup>. Kemunculan teori koalisi pada sistem demokrasi parlementer, lebih didasari oleh karena presiden terpilih atau kepala pemerintahan harus didukung oleh mayoritas parlemen dalam rangka kestabilan pemerintahan yang akan dijalankan.

Urgensi pembentukan koalisi bagi negara dengan sistem politik yang bersifat multi partai menjadi suatu keniscayaan. Dalam perspektif teori pilihan rasional, setidaknya dua pendekatan umum yang dapat menjelaskan mengapa partai-partai politik melakukan koalisi. Pendekatan tersebut yaitu *office seeking* dan *policy seeking*<sup>26</sup>. Pendekatan *office seeking* berangkat dari kerangka teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dan teori permainan (*game theory*). Asumsi yang dibangun

---

<sup>25</sup> Nurhasim, Moch. (2018). Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018. Jurnal Penelitian Politik. Volume 15 No. 2 Desember 2018 hal. 129

<sup>26</sup> Laver, Michael, Colin Rallings and Michael Thrasher, (1987). “Coalition Theory and Local Government: Coalition Payoffs in Britain” British Journal of Political Science, Vol. 17, No. 4 (1987) hal:501-509

adalah bahwa partai sebagai entitas tunggal (*single entity*) memiliki kecenderungan kalkulatif, dan hanya peduli pada usaha untuk mendapatkan jabatan/kekuasaan<sup>27</sup>. Karena misi utama adalah kekuasaan, maka pendekatan ini menggunakan jumlah kursi atau jumlah mitra kerjasama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi. Sehingga pembentukan postur anggota koalisi dilakukan dengan menggunakan formula *Minimum Winning Coalition* (MWC). Secara sederhana, formula MWC didasarkan atas kalkulasi jumlah minimum yang diperlukan untuk mendapatkan posisi mayoritas dalam parlemen<sup>28</sup>

Sementara itu, pendekatan *policy seeking* sedikit berbeda dengan pendekatan *office seeking*. Pendekatan *policy seeking* berangkat dari pandangan bahwa partai politik bukan entitas yang semata-mata berorientasi pada pencarian kekuasaan. Tetapi sebaliknya, partai politik adalah juga institusi yang setia pada agenda ideologi tertentu dan berusaha untuk mempengaruhi dan atau mewujudkannya dalam kebijakan konkret. Dalam pendekatan ini, pembentukan koalisi bukan hanya ditentukan oleh jumlah mereka yang bergabung, tapi juga agenda kebijakan macam apa yang ingin diwujudkan oleh partai politik sehingga tidak bertentangan dengan ideologi partai yang bersangkutan. Oleh karena itu, postur koalisi menggunakan alokasi portofolio dalam menentukan orientasi kebijakan khusus yang disasar oleh sebuah partai politik.

---

<sup>27</sup> Back, Hanna. (2005). Intraparty Politics and Coalition Formation: Evidence from Swedish Local Government. *Paper presented at the ECPR Joint Session, Granada, 14-19 April 2005*

<sup>28</sup> Machasin, Luthfi, (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 19, Nomor 3, Maret 2016 (234-250)

Salah satu teori dari pendekatan *office seeking* yang amat terkenal adalah karya William Riker “*The Theory of Political Coalitions*”. Riker berpendapat bahwa secara umum para politisi membentuk koalisi karena keinginan untuk menang (*minimal winning coalition-MWC*)<sup>29</sup>. Menurut Jumari (2012) Asumsi dasar MWC adalah: **Pertama**, partai politik berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka. Misalnya dalam sistem parlementer, kekuasaan berarti partisipasi dalam kabinet, dan kekuasaan secara maksimum bisa diartikan dengan memegang sebanyak mungkin posisi dalam kabinet. **Kedua**, mekanisme MWC adalah diperlukannya jumlah kursi tertentu untuk mencapai kemenangan yang minimal (cukup 50% + 1) di parlemen. **Ketiga**, MWC cukup memerlukan koalisi dua atau lebih partai yang dapat mengontrol kursi di parlemen, tetapi “minimal” dalam arti mereka tidak memasukan partai-partai yang dianggap “tidak perlu” untuk mencapai kemenangan.

Partai secara tipikal memiliki motif dalam berkoalisi yang didasari oleh dua faktor: **pertama**, pendekatan yang berorientasi pada kekuasaan (*office oriented approaches*), dan **kedua**, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approaches*). Pendekatan yang berorientasi pada kekuasaan mengasumsikan bahwa umumnya partai menaruh perhatian pada kekuasaan semata. Dan oleh karena itu, mereka selalu mempertimbangkan kekuatan kursi partai politik dalam parlemen. Sedangkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan mengasumsikan bahwa partai sangat memberi perhatian pada kebijakan apapun rasionalitasnya, mereka akan selalu mengambil posisi program partai dalam

---

<sup>29</sup> Ibid hal 235

satu atau lebih dimensi kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan koalisi<sup>30</sup>.

Berdasarkan pendekatan motivasi pembentukan koalisi sebagaimana telah diuraikan, maka hakikat koalisi secara filosofis adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama, menjadikan satu persepsi, baik melalui persepsi ancaman bersama, atau kesadaran bahwa tujuan mereka tidak akan dapat dicapai bila hanya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, hal yang terpenting dalam koalisi adalah penyatuan motif dan keterampilan berpolitik. Upaya penyatuan visi dan gagasan itu, karena sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik diantara partner koalisi, sehingga semua pihak dapat memperoleh hasil secara maksimal<sup>31</sup>.

Dengan mengacu pada teori koalisi dan segala problematika yang ditimbulkan, maka nyaris koalisi yang terjadi saat ini tidak ada yang berbasis pada sistem presidensial, apalagi didasarkan pada formula pemilihan kepala daerah langsung yang dikombinasikan dengan multi partai dan pemilu serentak. Kelemahan teori-teori koalisi di atas paling tidak menunjuk pada skema politik parlementer dengan negara bagian (*federal state*), bukan skema presidensial dengan negara kesatuan (*union state*), apalagi untuk melihat formula koalisi dalam pemerintahan daerah seperti Indonesia.

Meskipun teori-teori koalisi berangkat dari pengalaman demokrasi parlementer, bukan berarti sepenuhnya tidak bisa digunakan untuk menganalisis

---

<sup>30</sup> Pamungkas, Sigit. (2011). Partai Politik. Yogyakarta. *Institute For Democracy and Welfarism*.hal 83

<sup>31</sup> Ibid hal 84

konteks demokrasi presidensial maupun pada pemilihan kepala daerah<sup>32</sup>. Walaupun disadari bahwa teori-teori tersebut tidak bisa sepenuhnya untuk menjelaskan mengapa pilihan koalisi pada satu daerah dan pada suatu pilkada tidak sama dengan pola atau format koalisi pada pilkada di daerah yang lain, walaupun pelaksanaannya dilakukan secara serentak. Hal ini karena pada dasarnya partai memiliki formasi yang berbeda-beda. Kelemahan itu bisa ditafsirkan dengan teori kepentingan politik dan aktor yang menentukan dalam proses kandidasi politik dalam partai politik. Dalam konteks kandidasi tersebut, Norris misalnya menjelaskan dari sisi siapa yang memenuhi syarat, siapa yang mencalonkan dan siapa yang dicalonkan. Dalam proses itu, kandidasi--bukanlah sesuatu yang berjalan sendiri, tetapi bergantung pada laku atau tidaknya kandidat untuk dijual pada koalisi. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, proses kandidasi tidak mungkin tidak melibatkan pengurus partai politik di tingkat nasional, karena pengurus partai daerah “hanya” menyodorkan nama, tetapi Ketua Umum Partai dan Dewan Pengurus Pusat yang menentukan proses koalisi, apakah sebuah partai akan berkoalisi dengan partai A atau partai B.

Dalam kasus pada Pemilihan Kepala Daerah langsung, sebagaimana yang dipraktekkan di Indonesia, pola dan orientasi koalisi agak berbeda dengan pola dan orientasi koalisi yang dibangun di tingkat pusat, baik pada di tingkat legislatif maupun di eksekutif. Biasanya koalisi pada tingkat pusat akan berlanjut setelah calon yang diusung bersama memenangkan pemilihan presiden. Kelanjutan ini ditandai dengan koalisi di parlemen dan kecenderungan “bagi-bagi” kursi kabinet yang akan didistribusikan kepada anggota koalisi. Sedangkan pada tingkat lokal,

---

<sup>32</sup> Nurhasim (2018) op cit hal 130

biasanya koalisi akan berakhir (sekalipun tidak berakhir secara total) setelah momen pilkada telah selesai. Karena pada dasarnya tidak ada sistem “bagi-bagi” kekuasaan dalam jabatan untuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah, sebagaimana kebiasaan di tingkat pusat untuk penyusunan kabinet.

Berdasarkan perbedaan orientasi pembentukan koalisi pada pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, maka fokus analisis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan motivasi koalisi sebagaimana pandangan Debus yang menggunakan pendekatan orientasi pada kekuasaan (*office oriented approaches*).

### **C. Strategi Kampanye Politik**

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau pun organisasi politik dalam waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat<sup>33</sup>. Salah satu jenis kampanye politik adalah kampanye massa, yaitu jenis kampanye yang ditujukan kepada massa (orang banyak), baik melalui hubungan tatap muka maupun dengan menggunakan berbagai media, seperti surat kabar, radio, televisi, film, spanduk, baliho, poster, flyer dan selebaran serta medium interaktif melalui komputer (internet). Kampanye politik adalah salah satu tahapan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada semua kontestan baik partai politik atau perorangan untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik

---

<sup>33</sup> Arifin, Anwar. (2003). Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 14

sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suaranya kepada kandidat tertentu sewaktu pencoblosan<sup>34</sup>.

Pada setiap tahapan kampanye dalam perhelatan Pilkada, pasangan kandidat bersama tim pemenangannya akan berusaha mengumpulkan dukungan dan simpati pemilih agar pemilih yang bersangkutan dapat menjatuhkan pilihannya kepada calon kepala daerah yang dikampanyekan. Tim kampanye dapat menggunakan teknik-teknik kampanye yang kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan kampanye politik untuk mempengaruhi pemilih. Teknik-teknik kampanye politik dapat dilakukan melalui: *pertama*, kampanye dari rumah ke rumah (*door to door campaign*), yaitu calon kepala daerah atau tim pemenangannya mendatangi langsung para pemilih sambil mengidentifikasi atau menggali persoalan-persoalan yang dihadapi. Kampanye ini dipandang efektif terutama bagi calon pemilih yang dianggap masih ragu menentukan pilihannya sehingga dan dapat dibujuk untuk mengubah sikap dan pilihan politik mereka. *Kedua*, diskusi Kelompok (*group discussion*), dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat. *Ketiga*, kampanye massa langsung (*direct mass campaign*), dilakukan dalam bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai, pertunjukkan kesenian dan sebagainya. *Keempat*, kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*), yang dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di media cetak dan elektronik<sup>35</sup>.

Kampanye politik adalah kegiatan komunikasi yang telah direncanakan dengan baik yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat tertentu, dan pada

---

<sup>34</sup> Ruslan, Rosady. (2007). Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta: PT Rajawali Pers. Hal 27

<sup>35</sup> Ruslan (2007) hal. 37

waktu yang telah ditetapkan<sup>36</sup>. Kampanye pada prinsipnya adalah sebuah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara terlembaga atau terstruktur dengan tujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu<sup>37</sup>. Kampanye dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : (1) Tatap muka secara langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. (2) Pemanfaatan media massa seperti media cetak dan elektronik, melalui iklan di radio, televisi, majalah, poster/plakat/brosur, bioskop, telepon, dan internet yang berkaitan dengan figur calon dengan program-program unggulannya yang dapat menarik simpatik rakyat<sup>38</sup>.

Kampanye politik merupakan jenis kampanye yang pada umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang dicalonkan agar dapat menduduki jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan<sup>39</sup>.

Kampanye politik juga terkait dengan strategi politik. Oleh karena itu, dalam strategi politik untuk pemenangan Pilkada maupun pemilu, beberapa faktor yang mempengaruhi potensi terpilihnya seorang kandidat, yaitu *pertama, social background*, yaitu berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan; *Kedua, political socialization*, yaitu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang

---

<sup>36</sup> Evendi, F. & D. A. K. 2020. Strategi Kampanye Politik Pemilihan Kepala Desa Dalam Upaya Menggiring Opini Publik (Studi Pada Pilkades Serentak Kabupaten Blitar 2019). *Jurnal Translitera*. Vol.9. No.2. Hal.13.

<sup>37</sup> Ardipandanto, A. (2018). Strategi Kampanye Dan Kemenangan Ridwan Kamil Dalam Pilgub Jabar. *Jurnal Kajian* Vol.23. No.3. Hal.177.

<sup>38</sup> Ibid hal 33

<sup>39</sup> Ruslan op cit hal. 38

harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik; *Ketiga, initial political activity*, yaitu faktor yang menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini; *Keempat, apprenticeship*, yaitu faktor yang menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit; *Kelima, occupational variables*, yaitu suatu proses dimana calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, serta dilihat kapasitas intelektual dan kualitas kerjanya; *Keenam, motivations*, yaitu faktor yang mengandung pengertian bahwa orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal, yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik; dan *ketujuh, selection*, yaitu faktor yang menunjukkan pada mekanisme rekrutmen politik terbuka dan rekrutmen politik tertutup<sup>40</sup>.

Hal terpenting dalam konsep kampanye politik adalah strategi positioning. Pilihan strategi positioning untuk merebut dan mempertahankan “pasar” politik dapat dilakukan dengan memperhatikan citra dan kinerja sebuah kontestan (kandidat atau partai politik). Pilihan strategi positioning umumnya empat macam: *pertama*, strategi penguatan (*reinforcement strategy*). Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengembangkan jabatan publik tertentu. *Kedua*, strategi rasionalisasi (*rationalization strategy*). Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena

---

<sup>40</sup> Putra, Fadillah, (2003). Kebijakan Publik: Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hal.19.

kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut. Strategi ini dilakukan untuk mengubah sikap pemilih dan harus dilakukan secara hati-hati. *Ketiga*, strategi bujukan (*inducement strategy*). Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja atau atribut yang cocok dengan citra lainnya. *Keempat*, strategi konfrontasi (*confirmation strategy*). Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih<sup>41</sup>.

Menurut Arifin (2003:102), terdapat tiga jenis strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik, yaitu pertama, ketokohan dan kelembagaan, dengan cara memantapkan ketokohan dan merawat kelembagaan; Kedua, menciptakan kebersamaan dengan memahami masyarakat, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, serta memilah dan memilih media; dan ketiga, membangun konsensus, melalui kemampuan berkompromi dan kesediaan untuk membuka diri.

#### **D. Teori Tentang Modalitas**

Dalam konteks sejarah, istilah "*capital*" yang muncul pada abad 16-17 umumnya digunakan untuk menunjuk pada dua hal, yaitu: *pertama*, stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan. *Kedua*, stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah "*stock*" dan istilah "*capital*" sering dipakai secara bergantian. Perusahaan dagang Inggris yang

---

<sup>41</sup> Pito. T.A. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Nusa Indah. Hal 210-213

didirikan atas dasar saham saat itu dikenal sebagai “*joint stock companies*” atau “*capital stock companies*”. Peristilahan tentang “*capital*” ini dilakukan oleh Adam Smith (1776) yang didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya dikonsumsi sebagian sebagian (kecil), dan nilainya menjadi menyusut, maka unsur itu disebut “*fixed capital*” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal dikonsumsi secara total, maka ia disebut “*circulating capital*” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi).

Seiring berjalannya waktu, pemaknaan terhadap modal (modal) perlahan-lahan telah kehilangan makna intinya. Modal lebih diidentikkan dengan persoalan uang (modal ekonomi) semata. Padahal modal uang hanya salah satu bentuk dari sekian bentuk dimana ia bergerak. Pikiran manusia cenderung lebih mudah memahami uang sebagai modal tunggal. Namun demikian, hal itu merupakan suatu kesalahan apabila diasumsikan sebagai bentuk akhir dari modal. Seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, bahwa uang adalah “roda besar sirkulasi”, tetapi ia bukan modal karena nilai tidak dapat terkandung dalam potongan-potongan logam tersebut<sup>42</sup>.

Pemaknaan yang lebih luas tentang modal, dikemukakan Bourdieu (1986), yang dengan tegas menyatakan bahwa untuk memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial, maka perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, karena tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan

---

<sup>42</sup> De Soto, Hernando (2000). *The Mystery of Capital* (terjemahan). Bandung: Qalam. Hal 61

keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi, modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Bourdieu menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan.

Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Berdasarkan pandangan Bourdieu tersebut, maka modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk lain, seperti gelar gelar kesarjanaan. Sekalipun diperoleh melalui perguruan tinggi yang sama dan dalam jangka waktu pendidikan yang sama, masing-masing gelar kesarjanaan dengan bidang keahlian yang berbeda memiliki "nilai jual ekonomi" yang berbeda. Bahkan gelar kesarjanaan dalam bidang sama tetapi diperoleh dari perguruan tinggi yang berbeda akan mengandung nilai ekonomi yang berbeda. Seorang tamatan perguruan tinggi yang memiliki nilai akreditasi tinggi pada umumnya akan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang tamatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang rendah nilai akreditasinya<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Syahra, Rusydi. 2003. Modal Sosial Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 5(1): 1 – 22.

Dengan luasnya pemaknaan modal yang tidak sekedar bersifat ekonomi semata, maka Bourdieu (2012) mengartikan modal sebagai sebuah konsentrasi kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Setiap ranah menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup dengan baik dan bertahan di dalamnya. Menurut Bourdieu ciri penting modal yaitu: modal terakumulasi melalui investasi, bisa diberikan pada yang lain melalui warisan, memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya. Jenis modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbol. Modal ekonomi (produksi dan material). Modal sosial melalui hubungan-hubungan dan jaringan untuk penentuan dan produksi kedudukan sosial. Modal budaya, merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang diproduksi secara formal maupun warisan (tata krama, cara berbicara, sopan santun). Modal simbolis merupakan kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan kesetaraan dengan melalui kekuasaan fisik (perumahan mewah, mobil mewah). Modal akan dipertaruhkan dan diperebutkan dalam arena pertarungan<sup>44</sup>.

Berbeda dengan konsep Marx, yang menyatakan eksistensi kekuasaan terkait erat dengan, dan ditentukan oleh penguasaan modal ekonomi semata; Bourdieu berpendapat bahwa kekuasaan terkait erat dan ditentukan oleh kepemilikan, besaran (akumulasi), dan komposisi modal-modal; di mana dalam setiap medan perjuangan sosial, modal-modal tersebut mempunyai posisi dan bobot yang berbeda-beda sesuai dengan medan perjuangan sosial yang terkait. Dalam medan perjuangan sosial tertentu, mungkin modal ekonomi yang paling menentukan; tetapi, di medan perjuangan sosial lainnya, mungkin modal budaya,

---

<sup>44</sup> Syahra (2013) *ibid* hal. 1-22

modal sosial, atau modal simbolik yang paling menentukan. Sebagai contoh, dalam arena bisnis (dunia usaha), mungkin modal ekonomi yang paling menentukan; dalam arena politik (dunia politik), mungkin modal sosial yang paling menentukan; dalam dunia pendidikan, mungkin modal budaya dan modal simbolik yang paling menentukan.

Bourdieu keluar dari tradisi Marxian dengan mengembangkan teorinya tentang dominasi simbolis (praktik kuasa dalam konteks simbolis) untuk membedakan analisisnya dengan analisis Marxian klasik, di antaranya dengan menyodorkan konsep modal simbolik, modal kultural, modal sosial, dan modal ekonomi. Dalam kacamata Bourdieu, hubungan atau pemetaan kekuasaan di dalam masyarakat tidak berbentuk piramida atau tangga, tetapi lebih berupa konfigurasi yang berdasar kepemilikan dan komposisi modal-modal yang dimiliki. Dengan kata lain, Bourdieu mengoreksi Marx yang dianggap terlalu memperhatikan hubungan-hubungan produksi ekonomi (mereduksi bidang sosial hanya pada hubungan-hubungan produksi ekonomi) dan mengabaikan hubungan produksi budaya. Dalam pembagian kelas Bourdieu tidak sepenuhnya mengikuti Marx yang meletakkan basis analisisnya pada hubungan produksi ekonomi. Jika Marx membagi kelas ke dalam hubungan antagonis antara kelas pemilik modal/feodal dengan buruh/proletar, Bourdieu membaginya ke dalam kelas dominan, borjuasi kecil, dan populer dengan merujuk pada kepemilikan atau konfigurasi kepemilikan atas empat jenis modal<sup>45</sup>.

Istilah *capital* (modal) digunakan oleh Bourdieu dalam konsep sosiologinya untuk menjelaskan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, karena

---

<sup>45</sup> Krisdianto, Nanang (2014). Pierre Bourdieu Sang Juru Damai. KANAL. Vol. 2, No. 2, Maret 2014, Hal. 107

capital (modal) memiliki ciri-ciri yang, menurut Bourdieu, dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks pemikiran Bourdieu, konsep capital (modal) dipakai untuk menunjuk keseluruhan sumber daya atau kualitas yang dimiliki oleh individu-individu atau posisi-posisi sosial yang memiliki pengaruh atau nilai sosial. Selain itu, dalam sosiologi Bourdieu, konsep modal juga digunakan [sebagai alat] untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, dan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial tertentu. Menurut Bourdieu, semakin besar sumber daya (capital) yang dimiliki, baik dari segi komposisi maupun jumlahnya (diferensiasi dan distribusinya), maka akan semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, dalam komunitas sosial, para pelaku sosial akan menempati posisi masing-masing yang ditentukan oleh besaran modal dan komposisi modal yang dimiliki oleh masing-masing pelaku sosial<sup>46</sup>.

Bourdieu mengidentifikasi ada empat bentuk capital (modal) yang utama. Keempat bentuk modal yang dimaksud adalah: *economic capital* (modal ekonomi), *cultural capital* (modal budaya), *social capital* (modal sosial), dan *symbolic capital* (modal simbolik). Menurut Bourdieu, kandungan otoritas (kebernilaian) masing-masing bentuk modal ditentukan oleh medan-medan perjuangan (camp, ranah) terkait<sup>47</sup> (Bourdieu, 2012). Untuk memperoleh pemahaman tentang bentuk-bentuk modal sebagaimana dikonsepsikan Bourdieu, dapat dilihat pada uraian berikut:

Adapun matriks cakupan modal menurut Bourdieu (1986) adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Krisdianto (2014) *ibid* hal. 109

<sup>47</sup> Baharuddin dan Titin (2017) Hal. 209

**Tabel 2. 1**  
**Jenis Dan Cakupan Modal**

| Jenis Modal    | Cakupan   |
|----------------|---|
| Modal Ekonomi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Alat-alat produksi</li> <li>❖ Material</li> <li>❖ Kekayaan</li> </ul>  |
| Modal Sosial   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jaringan sosial</li> </ul>   |
| Modal Budaya   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kualifikasi Intelektual</li> <li>❖ Warisan keluarga</li> <li>❖ Pemilikan benda-benda budaya yang bernilai tinggi</li> <li>❖ Pengetahuan</li> </ul> |
| Modal Simbolik | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prestise (kehormatan/kewibawaan)</li> <li>❖ Status</li> <li>❖ Otoritas</li> <li>❖ Legitimasi</li> </ul>  |

Berdasarkan pemaknaan modal dari Bourdieu tersebut, maka dalam konteks kompetisi politik, seyogyanya modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pemilu langsung, yaitu modal sosial, modal budaya, modal simbolik dan modal ekonomi<sup>48</sup>.

Dalam arena kontestasi Pilkada, umumnya pasangan kandidat memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Semakin besar para kandidat mampu mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya

---

<sup>48</sup> Baharuddin, Tawakkal Dan Titin P (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance And Public Policy* Vol. 4 No. 1 February 2017. Hal 209

pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada teori modal sosial, modal budaya, modal politik, dan modal ekonomi, sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam. Namun demikian, apabila dari keempat jenis modal tersebut tidak seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh kandidat yang menjadi objek dalam kajian ini, maka peneliti akan menguraikan modal tersebut berdasarkan apa dilakukan oleh kandidat.

Secara ringkas, uraian tentang modal sebagaimana gagasan bourdieu dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

#### **A.1. Modal Ekonomi**

Konsep bourdieu tentang modal ekonomi (*economic capital*) adalah keseluruhan kepemilikan kekayaan materiil seperti tabungan uang yang banyak baik tunai maupun non-tunai, kepemilikan unit-unit usaha, kepemilikan tanah yang luas, pendapatan, warisan harta atau finansial, dan bentuk-bentuk kekayaan materiil lainnya yang dapat berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial digolongkan sebagai modal ekonomi. Dalam realitas politik, meski tidak menjadi unsur dominan, modal ekonomi sangat menentukan hubungan kekuasaan. Pada umumnya, kepemilikan modal ekonomi mengacu pada kepemilikan uang. Dalam gagasannya tentang modal ekonomi, Bourdieu tidak bisa lagi menyembunyikan pengaruh sosiologi Marxis dalam pikiran dan pemikirannya.

Sebagaimana telah disinggung di atas, Bourdieu (1986: 252) menyatakan bahwa, “modal ekonomi adalah akar dari semua jenis [bentuk] modal lain<sup>49</sup>.”

Dalam kontestasi pilkada, modal ekonomi/finansial juga sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Kapital ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap pemilukada oleh kandidat dan tim pemenangan. Selain itu juga peran modal politik menunjukkan bahwa dari fungsi partai juga tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi calon terutama yang bukan kader partai dan sementara itu partai-partai yang ada boleh jadi telah gagal menemukan figur-figur yang dianggap mampu bersaing terutama berkaitan dengan dukungan politik dan dana politik<sup>50</sup>.

Dalam sistem pemilihan kepala daerah langsung, peran signifikan atas modal ekonomi (finansial) terhadap kemenangan kandidat seolah tidak terbantahkan lagi. Faktor pembiayaan merupakan faktor kritical untuk sukses sebuah kampanye. Kegiatan sosialisasi politik oleh kandidat dalam sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya yang sangat banyak. Biaya yang dikeluarkan untuk beberapa item seperti pengadaan baliho, spanduk, mobilisasi kampanye, iklan politik, aksi sosial bahkan sewa konsultan politik. Bagi kandidat, keseluruhan kegiatan ini sangat penting bila ingin memenangkan pertarungan dalam Pilkada<sup>51</sup>.

Modal finansial tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para calon pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah untuk kepentingan

---

<sup>49</sup> Fujilestari, Noer A (2019). Kapital Politik Dalam Kontestasi Memperebutkan Kekuasaan. *Jurnal Caraka Prabhu Vol. 3 No. 1 Juni 2019* Hal.26

<sup>50</sup> Fujilestari (2019) *ibid* hal 29

<sup>51</sup> *Ibid* hal 31

mobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih<sup>52</sup>.

## **A.2. Modal Sosial**

Pembahasan tentang modal sosial telah mendapat atensi yang besar dari para pemikir sosial karena cakupan dan relevansinya yang kasat mata. Bahkan beberapa ilmuwan sosial menyebut modal sosial 'sangat dekat untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu sosial' (*close to becoming a join concept for all social science*). Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu populer dalam ilmu sosial, yaitu modal ekonomi (*economic/finansial capital*) dan modal manusia (*human capital*), modal sosial baru eksis bila berinteraksi dengan modal sosial<sup>53</sup>. Sifat ini tentu jelas berbeda dengan dua modal sebelumnya yaitu modal ekonomi dan modal manusia. Dengan modal ekonomi yang dimiliki, individu bisa melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, demikian halnya dengan modal manusia. Berdasarkan asumsi ini, maka Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya, modal sosial bukanlah entitas tunggal (*single entity*), tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen, yaitu: *pertama*, modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur

---

<sup>52</sup> Marijan, Kacung (2006). *Demokrasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada secara Langsung)*. Surabaya : Pustaka Eureka dan PusDeHAM .

<sup>53</sup> Yustika, Ahmad Erani (2008) *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing.

sosial. *Kedua*, modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor) baik individu, maupun lembaga dalam struktur tersebut<sup>54</sup>.

Dalam perspektif ini, menurut Yustika (2008) modal sosial tidak berbeda jauh dengan modal lainnya. Modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis.

### **A.3. Modal Budaya**

Modal budaya (*cultural capital*) adalah keseluruhan kode-kode budaya yang hidup dalam komunitas tertentu, yang diyakini dan diakui kebernilaiannya, serta berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial (untuk memperoleh kekuasaan dan status). Dalam *Language and Symbolic Power*, Bourdieu menyebut modal budaya (*cultural capital*) sebagai “prestise dan gengsi sosial”. Pierre Bourdieu (2012) membedakan modal budaya ke dalam beberapa bentuk: **Pertama**: bentuk modal budaya yang menubuh atau bentuk simbolik sebagai kebudayaan yang diinternalisasi, seperti: pengetahuan yang telah didapat, kemampuan menulis, cara pembawaan: sopan-santun, cara berbicara, cara bergaul, cara makan, dan lain sebagainya; **kedua**: bentuk modal budaya yang terobjektifikasi pada objek-objek materi dan media, seperti: koleksi lukisan karya pelukis terkenal, dan/atau benda-benda budaya lainnya yang bernilai tinggi; dan **ketiga**: bentuk modal budaya yang terinstitusionalisasi, seperti ijazah akademik. Penting untuk dicatat bahwa, terkait dengan modal kultural, Bourdieu tidak hanya mengangkat hakikat modal kultural yang harus diakumulasikan agar dapat mencapai tujuan,

---

<sup>54</sup> Coleman, James S. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Diterjemahkan Dari *Foundations of Social theory*. Bandung: Nusa Media. Hal. 98

tetapi juga mengeksplorasi kode-kode linguistik yang dengannya modal kultural disebarluaskan. Kapital Budaya yang mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Misalnya kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda yang bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, juga sertifikat (gelar kesarjanaan)<sup>55</sup>.

#### **A.4. Modal Simbolik**

Modal simbolik (symbolic capital) merupakan suatu bentuk modal ekonomi fisik (material) yang telah mengalami transformasi dan, oleh karena itu seolah tersamarkan dari bentuk aslinya. Dalam *Outline of A Theory of Practice* Pierre Bourdieu (1979) mendeskripsikan *symbolic capital* sebagai:

*“a transformed and thereby disguised form of physical „economic“ capital, produces its proper effect inasmuch, and only inasmuch, as conceals the fact that it originates in „material“ forms of capital wich are also, in the last analysis, the source of its effects.”*

Modal simbolik menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang, menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk modal fisik (material) meskipun modal material itu adalah sumber efek-efeknya. Dengan ungkapan lain, dapat dikemukakan bahwa, yang dimaksud *symbolic capital* (modal simbolik) adalah keseluruhan sumber daya yang eksistensinya berada di balik “keangkuhan” fisik (hexis) dan modal ekonomi yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial.

---

<sup>55</sup> Fauzi, Fashri (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol : Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jogjakarta : Juktapose.

Modal simbolik tidak terlepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi sebagai akibat khusus suatu mobilisasi. Aneka gelar (gelar kebangsawanan, gelar pendidikan, gelar keagamaan Haji, Kiai, Pendeta, dan lain sebagainya); kepemilikan mobil mewah dan layanan sopir pribadi, kepemilikan rumah mewah dan kantor yang megah di tempat-tempat yang strategis, adalah bentuk-bentuk dari modal simbolik.

Selain keempat modal yang diuraikan Bourdieu di atas, dalam konteks pilkada juga beberapa peneliti telah memasukkan modal politik sebagai bagian dari modal. Menurut Casey (2008), modal politik yaitu, jumlah dari kombinasi jenis lain untuk tindakan politik atau pengambilan investasi modal politik yang dikembalikan ke dalam sistem produksi (reinvestasi). Casey melihat paling tidak terdapat tujuh modal politik yaitu, modal kelembagaan, modal sosial, modal manusia, modal ekonomi, modal simbolik, modal moral, dan modal budaya. Modal politik dapat dikatakan sebagai salah satu bekal kandidat untuk bisa memenangkan suatu kontestasi politik. Seorang kandidat yang mempunyai modal politik yang lebih besar dari kandidat lainnya, juga akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dalam suatu kontestasi politik.

Kajian mengenai modal politik semakin menarik untuk dikaji lebih jauh karena ia mampu menjelaskan bagaimana pengaruh dukungan yang diberikan oleh suatu lembaga politik dalam hal ini ialah partai politik dan koalisinya terhadap kemenangan seorang kandidat. Sehingga, peneliti dalam hal ini memahami bahwa tanpa dukungan dari suatu lembaga politik akan sulit bagi seseorang untuk maju ataupun

menang dalam suatu pertarungan pemilihan pilkada. Hal ini karena melalui modal politik kelembagaan ini, calon kandidat bisa dengan mudah untuk mendapat simpati masyarakat dalam pemilihan umum.

Penjelasan singkat tentang ketujuh modal politik sebagaimana Casey (2008) antara lain adalah sebagai berikut: *pertama*, modal lembaga adalah kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota yang saling mengikat dan adanya perilaku sosial untuk bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama. Hubungan terkuat antara pencalonan dan lembaga-lembaga politik adalah partai politik. *Kedua*, modal sosial dalam hal ini terkait antara jaringan hubungan sebagai sumber daya kedudukan sosial artinya adanya hubungan jaringan seseorang untuk bisa mendapatkan posisi dalam kelompok sosial. *Ketiga*, modal manusia sumber daya yang ada dalam kepemilikan aktor tersebut misalnya kemampuan intelektual atau kualitas seorang aktor itu sendiri. *Keempat*, modal ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha termasuk untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pastinya membutuhkan dana atau biaya. Modal ekonomi diukur semata-mata sebagai kebanyakan pribadi mengenai kekayaan atau lebih tepatnya, potensi bahwa seseorang memiliki finansial untuk berkontribusi pada pencalonan mereka sendiri. *Kelima*, Modal simbolik merupakan sebuah simbol yang dimiliki oleh seseorang dan diketahui oleh orang banyak. Modal simbolik berkaitan erat dengan modal budaya dan dihasilkan sebagai produk dominasi. *Keenam*, modal budaya Budaya mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dapat mempengaruhi ide dan

gagasan seseorang. *Ketujuh*, modal moral merupakan suatu daya tarik yang penting oleh aktor yang ingin menarik hati<sup>56</sup>.

Berdasarkan uraian tentang teori modalitas, maka penggunaan teori modal sebagaimana gagasan Bourdie dalam arena kontestasi politik telah dijelaskan melalui studi Tocqueville yang menggambarkan bagaimana sistem demokrasi menjadi pemicu utama munculnya perkumpulan sosial. Hal tersebut dipahami karena dalam sistem demokrasi di Amerika Serikat pada waktu itu, perbedaan status sosial berdasarkan keturunan sudah tidak lagi menjadi acuan dalam bermasyarakat. Sehingga, setiap kepentingan bersama perlu diperbincangkan dan diusahakan secara bersama-sama lewat perkumpulan sosial tersebut. Studi ini penting karena memperlihatkan dampak yang signifikan atas munculnya perkumpulan sosial atas sistem politik demokrasi. Dalam konteks ini, modal merupakan relasi sosial, yang menegaskan bahwa suatu energi sosial hanya ada dan dapat membuahkan hasil dalam arena dimana ia memproduksi dan mereproduksi<sup>57</sup>.

Dengan demikian, dalam politik yang masih menjunjung tinggi nilai demokrasi maka tingkat kepercayaan publik adalah hal yang niscaya sebagai dasar untuk memperoleh kekuasaan. Seseorang atau sekelompok orang yang akan dipilih

---

<sup>56</sup> Casey, Kimberly. (2006) Defining Political Capital: a Reconsideration of Bourdieus Interconvertibility Theory.

<sup>57</sup> Yudo A. Mahendro (2016). Tindakan Sosial Ekonomi Dalam Perspektif New International Sociology JISPO VOL. 6 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2016. Hal. 93

berawal dari rasa percaya dan atas dasar kepercayaan itu masyarakat kemudian menjatuhkan pilihan politiknya<sup>58</sup>.

### **E. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu instrumen politik yang paling penting bagi masyarakat untuk mengawal pemerintahan. Melalui mekanisme pemilihan, mereka yang sudah dewasa dapat mengekspresikan kepentingannya melalui pelbagai isu yang bergulir dan memilih pemimpin mereka secara langsung atau tidak langsung. Pilkada menjadi arena kontestasi berikutnya untuk partai-partai politik setelah pemilihan legislatif dan presiden. Pilkada juga merupakan arena bagi partai politik untuk bersaing merebut kekuasaan di tingkat daerah. Koalisi adalah pilihan dominan bagi partai-partai politik untuk memenangkan calon mereka dan memenuhi kuota untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang.

Pemilihan kepala daerah langsung adalah proses politik yang melibatkan partisipasi publik, melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, serta melibatkan berbagai strategi untuk meraih sebanyak mungkin dukungan guna memenangkan jabatan politik tertinggi di daerah-daerah. Dengan kata lain, pilkada merupakan pertarungan politik yang berlangsung dalam arena yang serba kompleks,

---

<sup>58</sup> A. Mbolang, dkk (2020). Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2020 hal. 187

sehingga wajar jika dalam upaya meraih kemenangan berpotensi memicu konflik dan bahkan kekerasan politik<sup>59</sup>.

Pemilihan kepala daerah juga merupakan proses rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati ataupun walikota/wakil walikota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan luas. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi seorang pemimpin, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Calon pemimpin yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat luas merupakan aset yang sangat berharga bagi partai politik. Orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan tersebut perlu diberdayakan<sup>60</sup>.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang diuraikan pada bagian ini, dianggap relevan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan perbandingan sekaligus penjelasan posisi dan orisinalitas dari riset yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. **Penelitian Abdul Rasyid** (Tesis Program Magister Ilmu Politik Universitas Gadjamada Tahun 2012). Judul Penelitian : “Modalitas dan kontestasi politik : Studi tentang modalitas dan strategi pemenangan Pilkada pada pasangan kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si dan

---

<sup>59</sup> Melfa, Wendi (2013). Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu. Jurnal MMH Jilid 42 No. 2 Hal. 212

<sup>60</sup> Firmanzah (2008) Op cit hal. 70-71

Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser Kalimantan Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemilikan modalitas dalam menetapkan strategi pemenangan pilkada sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain baik modalitas politik, sosial dan ekonomi dalam *networking*, *image building* dan mobilisasi. Kandidat menggunakan kekuatan ketiga modalitas dan bersandar pada kekuatan yang dimiliki oleh kandidat, tim pemenangan, elit politik dan tokoh masyarakat, dan orang-orang terdekatnya yang berperan dan memiliki pengaruh untuk mendulang suara lebih banyak. Masing-masing Peran tersebut untuk memperoleh dukungan atau suara dari pemilih dengan *networking*, *image building* dan mobilisasi dari basis massa dari pilkada sebelumnya<sup>61</sup>.

2. **Penelitian Glen Moses Oroh** (Tesis Program Magister Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2018). Judul Penelitian: “Modalitas Pemilihan Kepala Daerah: (Studi Tentang Strategi Politik Pasangan Yasti Soepredjo –Yanny Ronny Tuuk Dalam Pemenangan Pilkada Di Kabupaten Bolaang Mongondow 2017)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pasangan Yasti-Yanny dalam pemenangan pilkada Bolmong berhasil memanfaatkan dan menjalankan dua dari empat modalitas yang ada. Dari keempat modalitas tersebut, yang paling dominan ialah modal modal ekonomi kemudian modal sosial yang

---

<sup>61</sup> Abdul Rasyid. Modalitas dan kontestasi politik :: Studi tentang modalitas dan strategi pemenangan Pilkada pada pasangan kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser Kalimantan Timur Hasil Penelitian Tesis Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012.

didukung oleh faktor dukungan politik. Pasangan tersebut berhasil maraup dukungan politik dengan memanfaatkan elit-elit politik untuk membantu kemenangannya<sup>62</sup>.

3. **Penelitian Luthfi Makhasin.** Penelitian ini berjudul: “Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pembentukan koalisi lintas partai politik menjelang dan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung serentak tahap satu pada tanggal 9 Desember 2015 di Jawa Tengah. Dengan modifikasi dari literatur yang ada tentang pembentukan koalisi dan orientasi partai politik di Indonesia, penelitiannya menemukan empat tipologi koalisi, yaitu: Koalisi Kecil-Ideologis (KKI), Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), Koalisi Besar-Ideologis (KBI) dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP). Selain itu, hasil kajian juga menemukan bahwa pada Pilkada serentak di Jawa Tengah, peran partai politik tetap tidak tergantikan sebagai lembaga demokrasi untuk mengusung dan mendukung pencalonan seseorang menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah.
4. **Penelitian Moch. Nurhasim.** Penelitian ini berjudul: “Koalisi ‘Nano-Nano’ pada Pilkada Serentak tahun 2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Praktek koalisi “nano-nano”

---

<sup>62</sup> **Penelitian Glen Moses Oroh.** Modalitas Pemilihan Kepala Daerah: (Studi Tentang Strategi Politik Pasangan Yasti Soepredjo –Yanny Ronny Tuuk Dalam Pemenangan Pilkada Di Kabupaten Bolaang Mongondow 2017). Tesis Program Magister Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2018.

menjadi pola koalisi yang berulang. Koalisi “nano-nano” adalah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Selain itu, model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer. Hal ini disebabkan karena kasus dan tipe koalisi dalam Pilkada di Indonesia dipandang dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan *office-seeking* dan pendekatan *policy-seeking*. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indonesia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan *cartel-seeking*.

5. **Penelitian Fitriyah.** Tema penelitian adalah: “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan

syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.

6. **Penelitian Endah Yuli Ekowati.** Tema penelitian adalah: “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada”. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa Pragmatisme politik menjadi dinamika pada pilkada serentak untuk pemilihan kepala daerah. Kekuatan petahana dan pembentukan koalisi partai-partai peserta pemilu yang tidak berimbang dapat mengurangi ataupun menghilangkan peluang partai politik lain untuk ikut dalam kontestasi. Selain permasalahan tersebut pengajuan pasangan calon oleh partai politik lebih banyak memperhatikan elektabilitas petahana ataupun popularitas calon yang akan diusungnya tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini menjadikan tidak berimbangya kekuatan sehingga menyebabkan calon dari partai politik atau koalisi partai politik lain enggan menjadi pesaing. Penelitian juga menyimpulkan bahwa cara-cara pragmatis yang digunakan partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam pilkada disebabkan karena tujuan partai politik ikut dalam kontestasi hanya berorientasi pada kemenangan untuk memperoleh kekuasaan.

Berdasarkan paparan tentang hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian pertama dan kedua, sekalipun keduanya membahas tentang modalitas dan strategi politik calon dalam pilkada, namun terdapat hal

yang membedakan dengan penelitian ini yaitu konteks sosial dan latar belakang kandidat yang akan diulas.

2. Penelitian ketiga dan keempat hanya berfokus pembentukan koalisi dalam proses kandidasi pada PemiluKada serentak.
3. Penelitian kelima hanya fokus pada rekrutmen politik untuk pencalonan PemiluKada yang dianggap masih bersifat sentralistis dan informal.
4. Penelitian keenam membahas soal dinamika dan pragmatisme dalam pola rekrutmen politik pada momentum Pilkada
5. Posisi penelitian ini, sekalipun juga mengkaji apa yang menjadi bahan kajian pada keenam penelitian di atas, namun keunikannya adalah terletak pada figur kandidat, antara lain: posisi kandidat dalam pusaran partai politik lainnya di Kabupaten Pohuwato, potensi secara ekonomi yang dimiliki oleh kandidat, kemampuan kandidat dalam meyakinkan partai politik lainnya dalam pembentukan koalisi, serta strategi kandidat dalam memenangkan kompetisi pada ajang pemiluKada serentak di Kabupaten Pohuwato tahun 2020.

### **G. Kerangka Pikir Penelitian**

Pilkada sejatinya menjadi panggung politik lokal yang menempatkan partai politik sebagai aktor utama pencipta berjalannya demokratisasi di tingkat lokal. Peran partai politik dalam konteks ini, adalah menyeleksi calon-calon yang dianggap layak untuk didorong berkompetisi di pentas perhelatan demokrasi tersebut. Dalam kasus Indonesia, regulasi PemiluKada menyerahkan proses kandidasi pada

mekanisme demokrasi internal partai. Oleh karena itu, otoritas sepenuhnya berada di partai politik, dan pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penentuan calon tersebut seringkali dianggap tidak penting. Lepasnya peran publik dalam proses pencalonan pada Pilkada karena regulasi seolah memberi hak eksklusif pada partai politik untuk menentukan calon usungan. Kondisi demikian justru berpotensi membuka ruang bagi praktik pencalonan yang berpotensi tidak demokratis.

Proses pencalonan dalam sirkulasi kepemimpinan daerah, terutama dengan sistem demokrasi yang multi partai, menjadi tantangan bagi partai politik untuk meletakkan konteks “persaingan” dalam setiap sirkulasi kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, menurut Schroder (2010) persaingan harus dilihat dalam konteks yang lebih dinamis (*dynamic competition*). Dengan kompetisi yang dinamis, maka kesadaran bahwa suatu partai politik tidak hadir sendirian, namun terdapat lawan-lawan politik yang juga memiliki tujuan dan hasrat yang sama yaitu bagaimana merebut kekuasaan. Hasrat persaingan dan perbedaan tujuan membuat setiap partai politik atau pun kandidat tertentu akan menetapkan strategi yang akan selalu direspon oleh partai politik atau kompetitor lainnya untuk memperebutkan simpati masyarakat melalui pengelolaan opini publik. Dinamika persaingan politik muncul ketika aksi dan reaksi terjadi dalam persaingan. Meskipun pada kenyataannya terdapat bentuk-bentuk lain seperti koalisi<sup>63</sup>.

Dengan meletakkan konsep “persaingan” dalam dinamika pemilihan kepala daerah, maka hal alamiah ketika setiap partai politik maupun kandidat menyusun strategi dengan satu tujuan memperebutkan kekuasaan itu. Menurut Schroder

---

<sup>63</sup> Scrooder (2013) op cit hal 87

strategi itu selalu memiliki tujuan, yakni “kemenangan.” Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandat, dalam perolehan tambahan suara, dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidat atau dalam memperoleh suara mayoritas untuk pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan. Bagaimana kemenangan itu digunakan, itulah tujuan politik yang ada di balik hasil yang muncul di permukaan.

Namun Schroder juga mengakui bahwa sebuah strategi adalah dampak dari langkah-langkah yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan dengan menjaga sumber daya. Tujuan tersebut pada sebagian besar kasus membawa kerugian kepada seseorang atau beberapa orang lainnya. Dengan kata lain, setiap gagasan politik, betapapun baik niatnya, hanya dapat diwujudkan dalam konfrontasi dengan penentang gagasan tersebut. Implementasi sebuah gagasan tidak banyak berhubungan dengan alasan atau rasionalitas, tetapi lebih berhubungan dengan kekuasaan dan pengaruh. Hal yang sama berlaku pula bagi perencanaan strategi kampanye. Bahkan kata kampanye sesungguhnya menutupi isu yang sebenarnya, yakni suatu pertarungan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Dari sini jelas bahwa yang diperjuangkan adalah kekuasaan dan pengaruh, karena pada kenyataannya yang dipersoalkan senantiasa adalah perolehan atau kehilangan kekuasaan<sup>64</sup>.

Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah strategi politik yang dilakukan oleh figur Saipul Mbuinga dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato. Strategi tersebut antara lain strategi pembentukan koalisi dukungan partai politik serta strategi dalam memperoleh kemenangan. Pembahasan tentang

---

<sup>64</sup> Schroder (2013) *ibid* hal. 89

strategi politik terutama dalam menggalang koalisi dalam pilkada menjadi subjek kajian yang menarik apalagi dalam sistem multipartai, hal ini menurut Khadijah dan Valina (2020) karena tidak ada satupun partai politik yang mampu berkuasa tanpa membangun kerja sama dengan partai politik lainnya.

Berdasarkan literatur penelitian, terdapat dua model atau pendekatan teoritis utama yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pembentukan koalisi, yaitu pendekatan *office-seeking* dan *policy-seeking*. *Office-seeking* menggunakan jumlah kursi atau jumlah partner kerja sama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi, sedangkan *policy-seeking* melihat aspek posisi kebijakan dan ideologi atau platform partai<sup>65</sup>.

Seperti halnya pembentukan koalisi pemerintah setelah pemilu, munculnya koalisi pra pemilu merupakan hasil proses tawar menawar antar pimpinan partai. Misalnya, pemimpin partai yang ingin membentuk koalisi pra pemilu harus mencapai kesepakatan atas strategi pemilu bersama dan pembagian keuntungan jabatan yang mungkin diperoleh mereka. Hal ini mungkin melibatkan pembentukan platform koalisi bersama, memutuskan partai mana yang dapat menjalankan jabatan yang lebih berpengaruh, memilih kandidat partai mana yang harus mundur demi pencalonan kandidat dari mitra koalisi mereka di daerah tertentu, atau menentukan pemimpin mana yang akan menjadi kepala daerah. Jelasnya, setiap proses tawar-menawar koalisi pra pemilu akan melibatkan serangkaian masalah distribusi dan ideologis yang pelik. Pada akhirnya, pemimpin partai harus mempertimbangkan insentif untuk

---

<sup>65</sup> Laver, Michael, Colin Rallings and Michael Thrasher, (1987). "Coalition Theory and Local Government: Coalition Payoffs in Britain" *British Journal of Political Science*, Vol. 17, No. 4 (Oct., 1987):501-509.

membentuk koalisi pemilu dibandingkan dengan insentif untuk berjalan secara independen<sup>66</sup>.

Dengan berdasar pada dua faktor tersebut, maka analisis permasalahan akan dilihat dari dua perspektif teori, antara lain teori strategi secara luas, dan teori elit. Teori strategi digunakan untuk membedah bagaimana strategi yang digunakan kandidat dalam memanfaatkan modal yang dimiliki, bagaimana strategi dalam membangun koalisi besar, dan juga bisa memenangkan kompetisi di antara empat pasangan calon yang berkompetisi. Sedangkan penggunaan teori elit dimaksudkan untuk melihat bagaimana posisi kandidat dalam pusaran elit politik lokal, sehingga dia menjadi pilihan partai politik lain untuk diusung dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan uraian dalam kerangka pikir penelitian, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

---

<sup>66</sup> Laver (1987) Ibid 507

**Bagan 1: Kerangka Pikir Penelitian**

